



**AKADEMI KOMUNITAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBİ (352595)**

LAPORAN KEUANGAN GLP SEMESTER II 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan SDM KP yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Wakatobi, 13 Januari 2025

Direktur,

KHAIRUDIN ISMAN, S.ST.Pi, M.Dev.Prac

NIP. 19761204200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI
SELATAN, KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAR www.kkp.go.id SUREL akkp.wakatobi@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wakatobi, 13 Januari 2025

Direktur,



KHAIRUDIN ISMAN, S.ST.Pi, M.Dev.Prac
NIP. 19761204200502 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur LRA Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp 20,718,402 atau mencapai 132 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester II Tahun 2024 adalah senilai 5,408,345,557 (Netto) atau mencapai 78 persen dari alokasi anggaran senilai Rp 6,977,329,000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan senilai Rp 28,763,995,819 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp 28,741,510,169; Aset Tetap (neto) senilai Rp 28,736,438,169; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp 0,00 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing senilai Rp 0,00 dan Rp 28,741,510,169 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 28,741,510,169

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 11,850,227,00 sedangkan jumlah

beban adalah senilai (Rp. 5,793,883,867,00) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai 5,782,033,640
Kegiatan Non Operasional Lainnya surplus senilai Rp 8,868,175,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai 5,773,165,465

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 ekuitas awal Rp. 29,127,048,479 menjadi Rp. 28,741,510,169

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% thd Angg	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.718.402	14.008.175	67,61	5.840.000
JUMLAH PENDAPATAN		20.718.402	14.008.175	67,61	5.840.000
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.166.969.912	1.566.894.555	72,31	1.116.599.168
Belanja Barang	B.2.2.	3.229.776.645	1.807.897.309	55,98	1.157.095.188
Jumlah Belanja Operasi		5.396.746.557	3.374.791.864	62,53	2.273.694.356
Belanja Modal	B.2.3.	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin		11.599.000	-	0,00	11.600.000
Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan GB					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.500.000.000	-	0,00	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	B.2.3.1	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Jaringan					
Belanja Modal Lainnya					
Jumlah Belanja Operasional		1.511.599.000	-	0,00	11.600.000
JUMLAH BELANJA		6.908.345.557	3.374.791.864	48,85	2.285.294.356

II. NERACA**AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
NERACA****31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dibendahara Pengeluaran	C.1.	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.	-	-
Persediaan	C.3	5.072.000	2.094.750
Kas Lainnya dan setara Kas	C.4	-	-
Jumlah Aset Lancar		5.072.000	2.094.750
ASET TETAP			
Tanah	C.4.	9.141.918.500	9.141.918.500
Peralatan dan Mesin	C.5.	3.774.472.477	3.762.873.477
Gedung dan Bangunan	C.6.	21.563.309.980	21.563.309.980
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.7.	237.704.730	237.704.730
Aset Tetap Lainnya	C.8.	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.9.	42.600.000	42.600.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10.	(6.425.241.979)	(5.623.452.958)
Jumlah Aset Tetap		28.334.763.708	29.124.953.729
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11.	-	-
Aset Lain-lain	C.12.	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset la	C.13.	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		28.339.835.708	29.127.048.479
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Utang kepada Pihak Pertama		-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.15.	28.339.835.708	29.127.048.479
Jumlah Ekuitas		28.339.835.708	29.127.048.479
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		28.339.835.708	29.127.048.479

III. LAPORAN OPERASIONAL

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.	11.850.227	25.310.000
JUMLAH PENDAPATAN		11.850.227	25.310.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.166.969.912	2.141.115.735
Beban Persediaan	D.3.	58.764.880	61.917.830
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.189.300.652	2.147.814.691
Beban Pemeliharaan	D.5.	577.082.479	405.489.535
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	401.651.384	395.643.186
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	801.789.021	827.874.554
JUMLAH BEBAN		6.195.558.328	5.979.855.531
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.183.708.101)	5.954.545.531
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	(124.839.000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	124.839.000
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		11.850.227	6.250.000
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.850.227	6.250.000
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.868.175	(118.589.000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		-	
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		(6.174.839.926)	6.073.134.531
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		(6.174.839.926)	6.073.134.531

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	29.127.048.479	30.079.186.937
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.773.165.465)	(6.073.134.531)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	(12.037.814)
- Koreksi Nilai Aset Tetap non revaluasi		-	(12.037.814)
- Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset		-	-
- Koreksi Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	5.387.627.155	5.133.033.887
- Ditagihkan ke entitas lain		5.387.627.155	5.133.033.887
- Diterima dari entitas lain			
- Transfer masuk			
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(385.538.310)	(952.138.458)
EKUITAS AKHIR	E.4.	28.741.510.169	29.127.048.479

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dan Nomor : 36/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Entitas berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 153 bahwa Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset dibidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mempunyai tugas Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kelautan dan Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi :

- a. Dalam Melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pembinaan karakter;
- h. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktek kerja taruna serta urusan alumni
- j. pelaksanaan pengawasan internal;
- k. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
- l. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berkomitmen dengan visi ***“Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam Pengelolaan Ekosistem Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Kawasan Indonesia Timur.”***

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

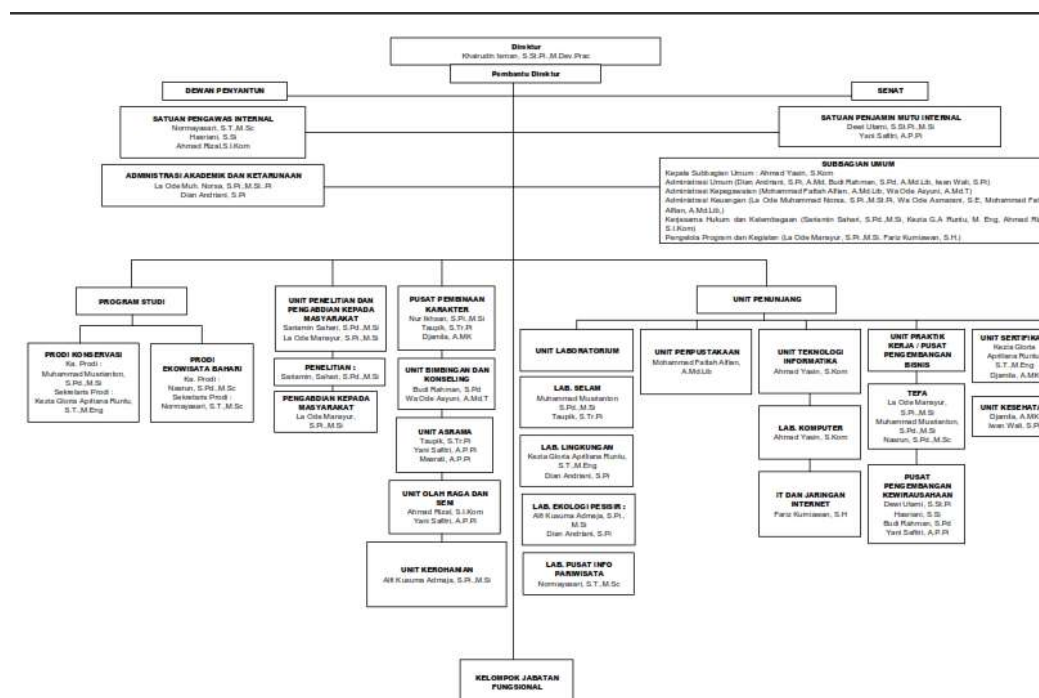
- Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis dan kompetitif bertaraf nasional dan internasional;
- Meningkatkan kualitas penelitian terapan kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan pengabdian terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Melengkapi dan menyempurnakan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar nasional dan internasional;
- Melaksanakan pengadministrasian dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001- 2015.

Data Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi didukung oleh 10 Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sbb :

- ✓ Tenaga Fungsional Dosen sebanyak 8,
- ✓ Tenaga Struktural 2 orang
- ✓ Tenaga Fungsional Keuangan 1 orang
- ✓ Arsiparis 1 orang
- ✓ dosen tetap non PNS 1 orang,
- ✓ PPNPN 8 rang
- ✓ PJLP 11 orang

Struktur Organisasi



Aplikasi SAKTI dan Kebijakan e-rekon di MONSAKTI

tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya Penggunaan Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang baru untuk tahun 2024 Permasalahan-permasalahan tersebut biasa terjadi pada semua Satuan Kerja, pada unit-unit akuntansi level Wilayah/UAPPA-W, Eselon I maupun Kementerian/Lembaga. Berbicara

mengenai akurasi data, ujung tombaknya adalah Satuan Kerja, tetapi bicara tentang koordinasi dan monitoring akurasi data, ujung tombaknya adalah UAPPA-W.

Selalu ada solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. apabila terdapat permasalahan terkait peningkatan kualitas LKKL harus sesegera mungkin untuk diselesaikan dengan cara mengoptimalkan telaah laporan keuangan. saat ini proses telaah sudah didukung dengan aplikasi MONSAKTI yang sangat mumpuni. penyusunan LKKL 2024 untuk menjadi perhatian bersama yaitu : 1). Penggunaan Satker konsolidasi, 2).Minimum kapitalisasi Aset Tetap 2024, 3).Integrasi data BMN kedalam e-Rekon&LK G2, 4).Kepdirjen baru terkait Bagan Akun Standar (BAS), 5).Rencana Eliminasi Hibah Langsung Belum Disahkan, 6).Monitoring Transfer Keluar-Transfer Masuk. Dari hasil kegiatan ini akan memberikan informasi yang lebih akurat terkait nilai Aset Negara.

Nilai minimum kapitalisasi berpedoman pada PMK 181 tahun 2016. Meskipun PMK ini sudah diterbitkan 2 tahun yang lalu, namun secara efektif berlaku pada tahun 2018. Dengan demikian perolehan aset tetap pada tahun 2018 sudah berpedoman pada peraturan ini. Sebagai informasi perubahan besaran nilai minimum kapitalisasi sbb : Peralatan dan mesin Rp. 300.000 ≤ menjadi Rp. 1.000.000 ≤, Gedung dan Bangunan dari Rp. 10.000.000 ≤ menjadi Rp. 25.000.000 ≤.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Akademi Komunitas KP Wakatobi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SAKTI Modul GLP yaitu serangkaian prosedur otomatis maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Sistem Akutansi terintegrasi ke semua aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Persediaan dan Aset. SAKTI GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan

Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI ASET adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis**Akuntansi****A.3. Basis Akuntansi**

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar**Pengukuran****A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh [Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP](#) yang merupakan entitas pelaporan dari [Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi](#). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor [Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi](#) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Akademi Komunitas Kelautan dan

Perikanan Wakatobi adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
- Pendapatan Biaya Pendidikan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai aset tetap penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya. Dalam hal nilai aset tetap hasil

revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan dikarenakan transfer masuk dari Satker lain. Terutama dari Pusdik KP, SUPM Bone. Namun apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya dan dilakukan proses penghapusan aset.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

c) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2020 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang dikelola oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi pada tahun 2024 dengan Rincian sebagai berikut :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan	15.677.000,00	15.677.000,00
Jumlah Pendapatan	15.677.000,00	15.677.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.405.556.000,00	2.170.556.000,00
Belanja Barang	3.295.174.000,00	3.295.174.000,00
Belanja Modal	1.511.599.000,00	1.511.599.000,00
Jumlah Belanja	7.212.329.000,00	6.977.329.000,00

Anggaran tahun 2024, terdapat 8 kali Revisi yaitu :

1. Revisi DJA automatic adjustment (AA) belanja modal gedung dan bangunan pada tanggal 29 Januari 2024.
2. Revisi POK Pergeseran antar akun dalam satu RO untuk Pemenuhan Operasional Belanja jasa lainnya (PJLP) pada tanggal 21 Februari 2024
3. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) pada tanggal 19 April 2024
4. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) pada tanggal 03 Juni 2024.
5. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) pada tanggal 12 Juli 2024
6. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) dan pergeseran akun dalam satu RO berupa penambahan penelitian, memaksimalkan operasional, honor akreditasi dan gaji minus pada tanggal 20 September 2024
7. Revisi DJA Pengurangan Pagu Terkait Kelebihan gaji pegawai Sebesar Rp.235.000.000,00 dari Pagu 7.212.329.000, menjadi 6.977.329.000 pada tanggal 05 November 2024.
8. Revisi POK terkait kekurangan gaji sebesar Rp. 4.000.000 diambilkan dari Layanan Operasional untuk menutupi pagu minus gaji pegawai pada tanggal 12 Desember 2024

Realisasi Pendapatan
Rp 20.718.402,00

B.1. Pendapatan

Kebijakan pengelolaan Pendapatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2024 adalah senilai Rp 20.718.402,00 atau mencapai 132 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp 15,677,000,00 Pendapatan Akademi Komunitas KP Wakatobi, terdiri dari Pendapatan Hasil Sewa Aset, Tefa dan pengembalian hasil temuan Itjen. Rincian realisasinya adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Pendapatan	Realisasi s.d.31 Desember 2024
PNBP FUNGSIONAL		11.490.000
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.790.000
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.700.000
PNBP UMUM		9.228.402
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.245.590
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	622.585
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	360.227
PNBP FUNGSIONAL + UMUM		20.718.402

PNBP tersebut berasal dari :

Tanggal	Akun	Uraian Pendapatan	NTPN	Hasil Kegiatan	Realisasi s.d.30 September 2024
	PNBP FUNGSIONAL				11.490.000
30/01/2024	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	C2C0B6U8EU5G4B2H	Sewa Bus ITBM	350.000
02/07/2024			4E52C61QV4457SAB	Sewa Bus Man 1 Wakatobi	350.000
29/08/2024			79A0C55DF9LHOUEO	Sewa Peminjaman Bus An. WWF	2.800.000
29/08/2024			79A0C55DF9LHOUEO	Sewa Peminjaman Pick Up An. WWF	140.000
29/11/2024			FEE376U8EV38K9TJ	Pengisian Tabung Selam	300.000
29/11/2024			FEE376U8EV38K9TJ	Peminjaman Alat Selam	2.700.000
27/11/2024			A105D55DFA16RJ3U	Sewa Peminjaman Bus An. Hardin	350.000
27/11/2024			A105D55DFA16RJ3U	Peminjaman Alat Selam an. Evi	1.800.000
31/07/2024	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	B43B961QV450MCD2	PENJUALAN BIBIT RUMPUT LAUT DI PAK ANWAR PEMBUDIDAYA	1.500.000
15/10/2024			C2EB148VVF8JRU2E	PENJUALAN BIBIT RUMPUT LAUT DI PAK ANWAR PEMBUDIDAYA	1.200.000

Tanggal	Akun	Uraian Pendapatan	NTPN	Hasil Kegiatan	Realisasi s.d.30 September 2024
	PNBP UMUM				622.585
24 Juli 2024	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN SEPTEMBER 2023 AN. LaOde Muhammad Mansyur	123.000
24 Juli 2024			521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN AGUSTUS 2023 AN. LaOde Muhammad Norsa	185.000
24 Juli 2024			452D93CIFKDL253B	KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. AHMAD YASIN	30.585
24 Juli 2024			452D93CIFKDL253B	KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. LA ODE MANSYUR	30.000
24 Juli 2024			521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN APRIL 2023 AN.AhmadYasin	74.000
24 Juli 2024			452D93CIFKDL253B	KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. ALFI KUSUMA ADMAJA	30.000
24 Juli 2024			521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN SEPTEMBER 2023 AN. Sariamin Sahari	41.000
24 Juli 2024			521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN AGUSTUS 2023 AN.Mohammad Fattah Alfian	35.000
24 Juli 2024			521A061QV44Q8OC2	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN APRIL 2023 AN. KeziaGloria Apriliana Runtu	74.000

Tanggal	Akun	Uraian Pendapatan	NTPN	Hasil Kegiatan	Realisasi s.d.30 September 2024
	PNBP UMUM				8.245.590
24 Juli 2024	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	563C31JNFV8S8IQ8	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00253A DESEMBER 2023 AN. INDAH ALSITA	760.000
24 Juli 2024			F555248VVF01FJ05	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00235A NOVEMBER 2023 AN. LA ODE MANSYUR	180.000
25 Juli 2024			6510E61QV44Q9IM9	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00274A DESEMBER 2023 AN. LA ODE MUH. NORSA	760.000
26 Juli 2024			C1E563CIFKDL2K5Q	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00232A NOVEMBER 2023 AN. KHAIRUDIN ISMAN	450.000
29 Juli 2024			1C1906U8EUN6N5BG	Kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan pagar permanen TA. 2023 CV. Wakatobi Sejahtera	1.690.678
29 Juli 2024			147A07QLUP9J42P2	KELEBIHAN BAYAR PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK MELEBIHI SBM TA 2023	3.140.595
29 Juli 2024			2FD6C55DF9IDT4I9	Kelebihan bayar Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B dan Rektorat oleh CV Aisyah Dwi Putri TA.2023	1.264.317

Realisasi Belanja
Negara
Rp5,408,345,557

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II Tahun 2024 adalah senilai Rp 5,408,345,557 atau 78 persen dari anggaran belanja senilai Rp 6,977,329,000. Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2024

Uraian	2024		
	Pagu Setelah Revisi	Realisasi 31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.170.556.000,00	2.166.969.912,00	99,83
Belanja Barang	3.295.174.000,00	3.229.776.645,00	98,02
Belanja Modal	1.511.599.000,00	11.599.000,00	0,77
Total Belanja Kotor	6.977.329.000,00	5.408.345.557,00	77,51
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja Bersih	6.977.329.000,00	5.408.345.557,00	77,51

Realisasi Belanja TA 2023 **Turun** sampai 21 % **persen** dari tahun 2023 tidak adanya belanja modal dan ditahun 2024 adanya belanja modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 akan terapi di blokir (AA) Automatic Adjustment

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.166.969.912,00	2.141.115.735,00	1,21
Belanja Barang	3.229.776.645,00	3.011.878.152,00	7,23
Belanja Modal	11.599.000,00	11.600.000,00	(0,01)
Jumlah Bersih	5.408.345.557,00	5.164.593.887,00	4,72

Belanja Pegawai
Rp,2,166,969,912,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 2,166,969,912,00 dan Rp. 2,141,115,735,00 untuk belanja Pegawai Negeri Sipil sejumlah 12 orang.

**Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember TA 2024 dan 2023**

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok	560.362.800	678.123.800	(17,37)
Belanja pembulatan gaji PNS	5.392	11.503	(53,13)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39.906.850	46.567.260	(14,30)
Belanja Tunj. Anak PNS	13.637.700	14.666.528	(7,01)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	98.350.000	122.575.000	(19,76)
Belanja Tunj. PPh PNS	6.172.201	3.137.669	96,71
Belanja Tunj. Beras PNS	32.009.640	40.917.300	(21,77)
Belanja Uang makan PNS	74.796.000	98.781.000	(24,28)
Belanja Tunj. Umum PNS	3.415.000	8.870.000	(61,50)
Belanja Tunj. Profesi Dosen	50.567.700	76.591.400	(33,98)
Belanja Pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan)	802.675.424	988.946.179	(18,84)
Beban Gaji Pokok PPPK	172.650.800	18.380.600	839,31
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.048	256	1.090,63
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.674.740	618.380	655,97
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.746.220	123.676	1.311,93
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	20.940.000	2.500.000	737,60
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.807.480	724.200	840,00
Beban Uang Makan PPPK	29.958.000	3.108.000	863,90
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	241.030.917	28.912.984	733,64
Total	2.167.269.912	2.141.115.735	1,22
Pengembalian Belanja	300.000	-	
Realisasi Netto	2.166.969.912	2.141.115.735	1,21

Belanja Barang

Rp3,229,776,645,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan 2023 senilai Rp 3,229,776,645,00 dan Rp. 3,011,878,152,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan 7,23% dibandingkan tahun 2023.

**Realisasi Belanja Barang
30 September TA 2024 dan 2023**

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	650.684.587,00	1.423.826.400,00	(54,30)
Belanja Barang Non Operasional	484.256.768,00	533.810.100,00	(9,28)
Belanja Barang Persediaan	61.742.130,00	62.930.740,00	(1,89)
Belanja Jasa	1.054.359.297,00	190.178.191,00	454,41
Belanja Pemeliharaan	577.082.479,00	405.489.535,00	42,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	401.651.384,00	395.763.186,00	1,49
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	3.229.776.645,00	3.011.998.152,00	7,23
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3.229.776.645,00	3.011.998.152,00	7,23

Belanja Modal
Rp 11,599,000.00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing senilai Rp 11,599,000,00 dan Rp 11,600,000,00 Realisasi belanja modal Semester II tahun 2024 dari minimum pencairan (MP) PNBP.

Belanja Modal
Penambahan Nilai
Gedung dan
Bangunan Rp,0,00

B.2.3.1. Belanja Modal Penambahan Nilai gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari 2024 sampai 2023 tidak ada.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka dari KPPN.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai di Brankas	-	-
Kwintansi UP	-	-
Saldo Rekening Giro (BNI)	-	-
Jumlah	-	-

Nilai Kas di bendahara pengeluaran berita acara pemeriksaan Kas (cash opname) Nomor : B.2057/AKKP.WKTB/KU.520/X/2024 tanggal 30 September di kantor Akademi Komunitas KP Wakatobi terdiri dari :

Lembar uang kertas Rp.100.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp.0,00

Lembar uang kertas Rp. 50.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

Lembar uang kertas Rp. 20.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

Lembar uang kertas Rp. 10.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

Lembar uang kertas Rp. 5.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

Lembar uang kertas Rp. 2.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

Lembar uang kertas Rp. 1.000,00 sebanyak 0 lembar jumlah Rp. 0,00

1. Jumlah uang kertas senilai Rp. 24.000.000,00

Pecahan logam Rp. 1.000,00 Sebanyak Rp. 0 Keping jumlah Rp.0

Pecahan logam Rp. 500,00 Sebanyak Rp. 0 Keping jumlah Rp. 0

Pecahan logam Rp. 200,00 Sebanyak Rp. 0 Keping jumlah Rp.0

Pecahan logam Rp. 100,00 Sebanyak Rp. 0 Keping jumlah Rp.0

2. Jumlah uang logam senilai Rp.0

Total (1+2) Rp. 24.000.0000,00

Kas Lainnya dan setara
kas Rp.0,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

Persediaan Rp5,072,000,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp 5,072,000,00 dan Rp 2,094,750,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) ATK dan Obat-obatan pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	5.072.000,00	2.094.750,00
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Jumlah	5.072.000,00	2.094.750,00

Nilai persediaan sebagaimana Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan digudang persediaan Nomor. B.2741/BRSDM-AKKP.WKTb/PL.510/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp 5,072,000,00 terlampir.

RINCIAN BARANG PERSediaan HASIL INVENTARISASI FISIK PERSediaan**Per : 31 Desember 2024**

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Sistem	Hasil Opsik	KONDISI
						Baik/Usak/Rusak
2	3	4	5	6	7	8.
1	1010301001000071	Ballpoint Balliner (Biru). 3.1172.2024	Buah	235.000	235.000	Baik
2	1010301001000072	Pulpen Snowman. 8.1172.2024	Dos	48.000	48.000	Baik
3	1010301005000013	Buku Album. 4.1172.2024	Buah	90.000	90.000	Baik
4	1010301006000088	Map Batik. 7.1172.2024	Pack	160.000	160.000	Baik
5	1010301010000052	Lakban Hitam (sedang). 5.1172.2024	Buah	114.000	114.000	Baik
6	1010302001000070	Kertas HVS 80 gram F4. 1.1172.2024	Rim	300.000	300.000	Baik
7	1010302001000071	Kertas HVS 80 gram A4. 2.1172.2024	Rim	275.000	275.000	Baik
8	1010302001000072	Kertas HVS F4 80 gram. 1.1174.2024	Rim	595.000	595.000	Baik
9	1010302001000073	Kertas HVS A4 80 gram. 2.1174.2024	Rim	450.000	450.000	Baik
10	1010302002000026	Sticky Note (Memo). 6.1172.2024	Pack	180.000	180.000	Baik
11	1010302002000107	Catridge Hitam. 1.1163.2024	Buah	300.000	300.000	Baik
12	1010302002000108	Catridge Warna. 2.1163.2024	Buah	300.000	300.000	Baik
13	1010302002000109	Tinta Hitam (Cenon). 5.1163.2024	Botol	100.000	100.000	Baik
14	1010302002000110	Tinta Merah (Cenon). 6.1163.2024	Botol	50.000	50.000	Baik
15	1010302002000111	Tinta Biru (Cenon). 7.1163.2024	Botol	50.000	50.000	Baik
16	1010302002000112	Tinta Kuning (Cenon). 8.1163.2024	Botol	50.000	50.000	Baik
17	1010302002000113	Tinta Epson Warna Hitam. 1.1173.2024	Botol	450.000	450.000	Baik
18	1010302002000114	Tinta Epson Warna Merah. 2.1173.2024	Botol	450.000	450.000	Baik
19	1010302002000115	Tinta Epson Warna Kuning. 3.1173.2024	Botol	300.000	300.000	Baik
20	1010302002000116	Tinta Epson Warna Biru. 4.1173.2024	Botol	300.000	300.000	Baik
21	1010306010000051	Baterai AA. 3.1163.2024	Pack	140.000	140.000	Baik
22	1010306010000052	Baterai AAA. 4.1163.2024	Pack	135.000	135.000	Baik
Total				5.072.000	5.072.000	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

Tanah

Rp.9,141,918,500,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp9,141,918,500,00 dan Rp9,141,918,500,00, tidak ada perubahan dalam aset tanah. Rincian kepemilikan sertifikat :- Sertifikat Hak Pakai No. 21.10.05.05.4.00003 Tahun 19 September 2015 seluas 305.836 m², Lokasi Jl. Soekarno Hatta Desa Matahora, atas nama Pemerintah RI.Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peralatan dan Mesin

Rp3,774,472,477,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 3,774,472,477,00 dan Rp 3,762,873,477,00. Penambahan Peralatan dan Mesin bertambah dari Maksimum pencairan (MP) II PNBP di semester II tahun 2024 berupa perahu penumpang dan kamera bawah air.

Gedung dan Bangunan

Rp 21,563,309,980,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp21,563,309,980,00 dan Rp21,563,309,980,00 tidak ada Perubahan di Semester II tahun 2024

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp 237,704,730,00,00

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 237,704,730,00 dan Rp 237,704,730,00
Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Rp0,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp. 0,00 tidak ada Perubahan di Semester II tahun 2024

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp42.600.000,00

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp. 42,600,000,00 berdasarkan SK MenKP Nomor :222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 5 April 2023. transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah senilai Rp. 42.600.000,00 di Tahun 2021. KDP ini tidak dilanjutkan dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada tahun 2024 Akademi Komunitas KP Wakatobi. Sesuai arahan Itjen 3 pada Reviu Triwulan III disarankan untuk di hapus KDP Nilai Aset sudah lebih dari 2 Tahun dan ketika diajukan penghapusan sesuai surat usulan Nomor B.2408/AKKP.WKTB/PL.750/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 Perihal Usulan Permohonan Penghapusan BMN Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ditujukan kepada Sekretaris BPPSDM KP akan tetapi terkendala pada proses penghapusan dikarenakan penghapusan aset harus melalui Aplikasi SIMAN V2(sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2)

Transaksi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai
2	Rincian KDP yang masih akan dilanjutkan			42.600.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Jalan Kampus	331/BRSDM.AKKP.WKTB/PL.420/III/2021	03-Mar-21	23.000.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Rumah Jaga	314/BRSDM.AKKP.WKTB/PL.420/II/2021	26-Feb-21	19.600.000,00
Total				42.600.000,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(6,425,241,979)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (6,425,241,979) dan (5,623,452,958) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.774.472.477,00	321.660.848,00	3.452.811.629,00
2	Gedung dan Bangunan	21.563.309.980,00	473.063.775,00	21.090.246.205,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.704.730,00	7.064.398,00	230.640.332,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		25.575.487.187,00	801.789.021,00	24.773.698.166,00

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi belum memiliki aset tidak berwujud seperti software yang digunakan untuk keperluan operasional perkantoran.

Aset Lain-lain Rp0,00

C.11 Aset Lain Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak berubah adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, dan sampai tanggal pelaporan baru tidak ada Aset lain-lain di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Akumulasi
penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.801.789.021)

C.12 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi penyusutan / amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah (Rp.801.789.021) dan (Rp.5,623,452,958)

Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp 0,00

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak berubah adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Ekuitas
Rp 28,339,835,708,00

C.15 Ekuitas

Ekuitas 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 28,339,835,708,00 dan Rp 29,127,048,479,00 .

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB

Rp 11,490,000,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp 11,490,000,00 dan Rp 25,310,000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023*

Akun	Uraian Pendapatan	30-Sep-24	30-Sep-23	Naik / Turun (Rp)
PNBP FUNGSIONAL				
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.790.000	11.130.000	(2.340.000)
425411	Pendapatan Ujian/seleksi masuk pendidikan	-	1.580.000	(1.580.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	-	3.600.000	(3.600.000)
425421	Pendapatan Layanan pendidikan dan atau pelatihan	-	-	-
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.700.000	9.000.000	(6.300.000)
JUMLAH PNB FUNGSIONAL		11.490.000	25.310.000	(13.820.000)

* Pendapatan dari Penjualan, pengelolaan BMN

Akun	Uraian Pendapatan	Tanggal	Nilai
PNBP FUNGSIONAL			
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		8.790.000
	Sewa Bus ITBM	30/01/2024	350.000
	Sewa Bus Man 1 Wakatobi	02/07/2024	350.000
	Sewa Peminjaman Bus An. WWF	29/08/2024	2.800.000
	Sewa Peminjaman Pick Up An. WWF	29/08/2024	140.000,00
	Pengisian Tabung Selam	29/11/2024	300.000,00
	Peminjaman Alat Selam	29/11/2024	2.700.000,00
	Sewa Peminjaman Bus An. Hardin	27/12/2024	350.000,00
	Peminjaman Alat Selam an. Evi	27/12/2024	1.800.000,00
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		2.700.000
	PENJUALAN BIBIT RUMPUT LAUT DI PAK ANWAR PEMBUDIDAYA	31/07/2024	1.500.000
	PENJUALAN BIBIT RUMPUT LAUT DI PAK ANWAR PEMBUDIDAYA	15/10/2024	1.200.000
JUMLAH PNB FUNGSIONAL			11.490.000

Beban Pegawai

Rp2,166,969,912,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp.2,166,969,912,00 dan Rp. 2,086,747,639,00 Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	560.362.800	678.123.800	(17,37)
Beban Pembulatan Gaji	5.392	11.503	(53,13)
Beban Tunj.Suami/Istri	39.906.850	46.567.260	(14,30)
Beban Tunj.Anak	13.637.700	14.666.528	(7,01)
Beban Tunj.Struktural	7.560.000	7.560.000	-
Beban Tunj.Fungsional	98.350.000	122.575.000	(19,76)
Beban Tunj.PPH	6.172.201	3.137.669	96,71
Beban Tunj.Beras	32.009.640	40.917.300	(21,77)
Beban Tunj.Uang makan	74.496.000	98.781.000	(24,58)
Beban Tunj. Umum	3.415.000	8.870.000	(61,50)
Beban Tunj.Profesi Dosen	50.567.700	76.591.400	(33,98)
Beban Pegawai (Tunjangan khusus)	802.675.424	988.946.179	(18,84)
Beban Gaji Pokok PPPK	172.650.800	18.380.600	839,31
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.048	256	1.090,63
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.674.740	618.380	655,97
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.746.220	123.676	1.311,93
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	20.940.000	2.500.000	737,60
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.807.480	724.200	840,00
Beban Uang Makan PPPK	29.958.000	3.108.000	863,90
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	241.030.917	28.912.984	733,64
Jumlah	2.166.969.912,00	2.086.747.639,00	3,84

*Beban Persediaan
Rp58,764,880,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 58,764,880,00 dan Rp 61,917,830,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan obat-obatan, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	50.974.880,00	55.917.830,00	(8,84)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	7.790.000,00	6.000.000,00	29,83
Jumlah Beban Persediaan	58.764.880,00	61.917.830,00	(5,09)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2,194,300,652,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 2,194,300,652,00 dan Rp 2,151564,691,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan perkantoran	593.005.287,00	999.620.400,00	-40,68
Beban pengadaan bahan makanan	-	312.134.000,00	-100,00
Beban pengiriman surat dinas	1.091.300,00	640.000,00	70,52
Beban honor operasional	56.588.000,00	111.432.000,00	-49,22
Beban barang operasional lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban bahan	158.036.578,00	175.300.100,00	-9,85
Beban Honor output kegiatan	8.160.000,00	10.260.000,00	-20,47
Beban barang non operasional lainnya	318.060.190,00	347.000.000,00	-8,34
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	136.117.897,00	142.301.291,00	-4,35
Beban Langganan Telepon	-	-	#DIV/0!
Beban langganan daya dan jasa lainnya	21.088.500,00	21.436.900,00	-1,63
Beban sewa	7.500.000,00	9.490.000,00	-20,97
Beban jasa profesi	16.487.000,00	11.950.000,00	37,97
Beban Jasa Lainnya	873.165.900,00	5.000.000,00	17363,32
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	-	-	#DIV/0!
Jumlah	2.194.300.652,00	2.151.564.691,00	1,99

*Beban Pemeliharaan
Rp595,650,278,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 595,650,278,00 dan Rp 386,921,736,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274.139.000,00	255.571.201,00	7,27
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.720.278,00	116.637.535,00	51,51
Beban Pemeliharaan Jaringan	144.791.000,00	14.713.000,00	884,10
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	#DIV/0!
Jumlah	595.650.278,00	386.921.736,00	53,95

Beban Perjalanan
Dinas
Rp401,651,384,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp401,651,384,00 dan Rp395,643,186,00

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	390.236.384,00	385.523.186,00	1,22
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.415.000,00	10.120.000,00	12,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0,00
Jumlah	401.651.384,00	395.643.186,00	1,52

Beban Penyusutan
Rp801.789.021,00

D.7. Beban Penyusutan

Jumlah Beban penyusutan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 801.789.021,00 dan Rp 417,639,992,00

Beban Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian atas Beban penyusutan untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	321.660.848,00	177.575.906,00	81,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473.063.775,00	236.531.887,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	3.789.304,00	1.894.652,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.275.094,00	1.637.547,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	801.789.021,00	417.639.992,00	91,98

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	Rp -	Rp (124.839.000)	-
Pendapatan dari penjualan tanah,gedung dan bangunan	Rp -	Rp -	-
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	8.868.175,00	6.250.000,00	41,89
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	622.585,00	5.940.000,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.245.590,00	310.000,00	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	-	-	#DIV/0!
Beban penyesuaian Nilai persediaan	-	-	#DIV/0!
Jumlah	8.868.175,00	(118.589.000,00)	(107)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp, Rp.
29,127,048,479,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada LPE per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 29,127,048,479,00 dan Rp30,079,186,937,00

*Defisit LO
(6,073,134,531)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp (6,174,839,926) dan Rp (6,073,134,531,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas
Rp 5,387,627,155,00*

E.3 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp 5,387,627,155,00 dan Rp5,133,033,887,00

*Ekuitas Akhir
(Rp.787,212,771)*

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp. (787,212,771) dan Rp (952,138,458)

*Ekuitas Akhir Rp,
28,339,835,708,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp. 28,339,835,708,00 dan Rp 29,127,048,479,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- ***(automatic Adjustment) Pagu blokir***

Sesuai Surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 perihal Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) BPPSDM KP TA 2024. Akkp mendapat pagu blokir sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yaitu berupa pemblokiran kegiatan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Blokir Akun (533115 - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan) berupa Biaya Perancangan (Design) Konstruksi sebesar Rp.67.100.000 sebanyak 1 Paket, Biaya Pengawasan (Supervisi) Konstruksi sebesar Rp.67.100.000 sebanyak 1 Paket (2376.RBJ.51.A)
2. Blokir Akun (533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) berupa Biaya Pembangunan Konstruksi sebesar Rp. 1.365.800.000 sebanyak 1 Unit (2376.RBJ.51.A)

- ***Menghapus KDP***

transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah senilai Rp. 42.600.000,00 Tahun perolehan 2021. KDP ini tidak dilanjutkan dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Akademi Komunitas KP Wakatobi. Ditahun 2024 tersediannya anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.500.000.000. dengan skema di awal januari 2024 akan melakukan revisi untuk dibagi belanja modal gedung dan bangunan sebagian untuk melanjutkan KDP. Sebagai dasar surat pernyataan melanjutkan KDP pada Laporan Keuangan semester 2 tahun 2023 pada bulan Januari 2024. Ternyata di awal januari 2024 sesuai Sesuai Surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 perihal Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) BPPSDM KP TA 2024. Terdapat pemblokiran pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan dan diperkuat arahan dari inspektur 3. Menyatakan bahwa KDP lebih dari 2 tahun disarankan dihapus untuk mengurangi resiko-resiko kedepan akan tetapi terkendala

dalam proses penghapusan dikarenakan ada skema baru tata cara penghapusan harus menggunakan Aplikasi SIMAN V2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2) dan memperbaharui surat-surat usulan penghapusan yang sudah diusulkan di BPPSDM KP.

Transaksi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai
2	Rincian KDP yang masih akan dilanjutkan			42.600.000,00
	Pengadaan - Perencanaan Jalan Kampus	331/BRSDM.AKKP.WKTB/ PL420/III/2021	03-Mar-21	23.000.000,00
	Pengadaan - Perencanaan Rumah Jaga	314/BRSDM.AKKP.WKTB/ PL420/II/2021	26-Feb-21	19.600.000,00
	Total			42.600.000,00

- **Anggaran Penelitian dari Pusdik KP**

A. Tahap Pencairan

Sesuai surat Kontrak Penelitian terapan terpusat tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 325/PPK.PUSDIK/PL.430/V/2024 pada hari senin tanggal 13 Mei Tahun 2024 menjelaskan bahwa AKKP Wakatobi menerima dana penelitian terapan terpusat dari Pusat pendidikan sebesar Rp. **39,996,950,00** dibagi 2 penelitian yaitu:

1. Penguatan kawasan konservasi melalui rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode Web spider untuk mendukung ekowisata desa Matahora sebesar Rp. 20.000.000,00
2. Analisis Penerapan Media *Coral Tree* untuk Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Jenis *Acropora cervicornis* di Perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 19,996,950,00

dan pencairannya dilakukan 2 kali pencairan dengan skema termin 1 dicairkan 70% dan termin ke 2 sebesar 30%. Pencairan dana tersebut ditujukan ke rekening penampung dengan nomor rekening **1847338030** dan nama rekening **RPL**

103 KS AKKP WAKATOBI UTK PENELITIAN.

Sesuai Nomor SPPD nomor 241751303017130 tanggal 29 Mei 2024 dari Sekretariat badan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan sebesar Rp. 27,997,865.00 dana penelitian telah masuk ke rekening RPL 103 KS AKKP WAKATOBI UTK PENELITIAN. Ditarik oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 05 Juni 2024 ditarik sebesar Rp. **27.959.281** penarikan tidak utuh dikarenakan biaya Tunggakan RE dan SO sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 20.000 ditambah biaya CR TNT CR sebesar Rp. 1.416,00 dan dikurangi lagi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000. dana telah diserahkan kepada pihak dosen peneliti sesuai Berita Acara serah terima dana termin satu penelitian Penguatan kawasan konservasi melalui rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode Web spider untuk mendukung ekowisata desa Matahora Nomor B.1117/AKKP.WKTB/BRSDM.450/VI/2024 pada hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 sebesar Rp. 14.000.000 dan penelitian Analisis Penerapan Media *Coral Tree* untuk Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Jenis *Acropora cervicornis* di Perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara Nomor B.1116/AKKP.WKTB/BRSDM.450/VI/2024 pada hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 sebesar Rp. 13.997.865.

B. Tahap Pencatatan

Dana Penelitian dicatat sebagai Kas Tunai Lainnya diinput di SAKTI modul bendahara pengeluaran di bendahara – pemindahan kas – kas tunai bendahara pengeluaran. Sehingga terekam di buku kas umum (BKU) bulan Juni 2024.

C. Tahap Penelitian

Terinformasi menurut dosen peneliti penelitian berlangsung berproses sampai bulan November 2024

- **TEMUAN ITJEN**

Hasil temuan Itjen pada surat Tugas Inspektorat Jenderal dengan nomor : T.4562.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024(terlampir) dan Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024

pada Akademi Komunitas KP Wakatobi dengan nomor :
T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan hasil
tindak lanjut Pengembalian (terlampir)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,850,227	25,310,000	(13,459,773)	(53.18)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,850,227	25,310,000	(13,459,773)	(53.18)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,850,227	25,310,000	(13,459,773)	(53.18)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,166,969,912	2,141,115,735	25,854,177	1.208
Beban Persediaan	58,764,880	61,917,830	(3,152,950)	(5.092)
Beban Barang dan Jasa	2,189,300,652	2,147,814,691	41,485,961	1.932
Beban Pemeliharaan	577,082,479	405,489,535	171,592,944	42.317
Beban Perjalanan Dinas	401,651,384	395,643,186	6,008,198	1.519
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM

Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	801,789,021	827,874,554	(26,085,533)	(3.151)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,195,558,328	5,979,855,531	215,702,797	3.607
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,183,708,101)	(5,954,545,531)	(229,162,570)	3.849
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(124,839,000)	124,839,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	124,839,000	(124,839,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,868,175	6,250,000	2,618,175	41.891
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,868,175	6,250,000	2,618,175	41.891
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	8,868,175	(118,589,000)	127,457,175	(107.478)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,174,839,926)	(6,073,134,531)	(101,705,395)	1.675
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,174,839,926)	(6,073,134,531)	(101,705,395)	1.675

Keterangan :
FINAL

Wakatobi, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHAIRUDIN ISMAN, S.S.T.PI., M.DEV.PRAC
NIP. 197612042005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)
Tgl Data : 24/01/25 12:25 PM
Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	29,127,048,479	30,079,186,937	(952,138,458)	(3.17)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,174,839,926)	(6,073,134,531)	(101,705,395)	1.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(12,037,814)	12,037,814	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(12,037,814)	12,037,814	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,387,627,155	5,133,033,887	254,593,268	4.96
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(787,212,771)	(952,138,458)	164,925,687	(17.32)
EKUITAS AKHIR	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.7)

Keterangan :
FINAL
Wakatobi, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHAIRUDIN ISMAN, S.S.T.PI., M.DEV.PRAC
NIP. 197612042005021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI) 352595

Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,677,000	20,718,402	5,041,402	132	15,677,000	31,560,000	(15,883,000)	201
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,677,000	20,718,402	5,041,402	132	15,677,000	31,560,000	(15,883,000)	201
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	15,677,000	20,718,402	5,041,402	132	15,677,000	31,560,000	(15,883,000)	201
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,977,329,000	5,408,345,557	(1,568,983,443)	78	5,217,092,000	5,164,593,887	52,498,113	99
1. Belanja Pegawai	2,174,556,000	2,166,969,912	(7,586,088)	100	2,171,300,000	2,141,115,735	30,184,265	99
2. Belanja Barang	3,291,174,000	3,229,776,645	(61,397,355)	98	3,034,192,000	3,011,878,152	22,313,848	99
3. Belanja Modal	1,511,599,000	11,599,000	(1,500,000,000)	1	11,600,000	11,600,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI) 352595

Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,977,329,000	5,408,345,557	(1,568,983,443)	78	5,217,092,000	5,164,593,887	52,498,113	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Wakatobi, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasai Pengguna Anggaran

KHAIRUDIN ISMAN, S.S.T.PI., M.DEV.PRAC
NIP. 197612042005021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 24/01/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 24/01/25 3:04 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	5,072,000	2,094,750	2,977,250	142.13
JUMLAH ASET LANCAR	5,072,000	2,094,750	2,977,250	142.13
ASET TETAP				
Tanah	9,141,918,500	9,141,918,500	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,774,472,477	3,762,873,477	11,599,000	0.31
Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	21,563,309,980	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	237,704,730	237,704,730	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42,600,000	42,600,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,425,241,979)	(5,623,452,958)	(801,789,021)	14.26
JUMLAH ASET TETAP	28,334,763,708	29,124,953,729	(790,190,021)	(2.71)
JUMLAH ASET	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.70)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.70)
JUMLAH EKUITAS	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.70)
JUMLAH EKUITAS	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.70)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.70)

Keterangan :
FINAL

Wakatobi, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHAIRUDIN ISMAN, S.S.T.PI., M.DEV.PRAC
NIP. 197612042005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM

Tgl Cetak : 24/01/25 3:05 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,072,000	0
0.0	131111	Tanah	9,141,918,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,774,472,477	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	0
0.0	134112	Irigasi	130,731,000	0
0.0	134113	Jaringan	106,973,730	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	42,600,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,060,603,522
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,310,196,413
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	26,525,128
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	27,916,916
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,408,345,557
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,718,402	0
0.0	391111	Ekuitas	0	29,127,048,479
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	2,700,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8,790,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	360,227
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	622,585
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,245,590
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	560,362,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,392	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39,906,850	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,637,700	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	98,350,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,172,201	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,009,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	74,496,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3,415,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	50,567,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	172,650,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,048	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,674,740	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,746,220	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	20,940,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,807,480	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	29,958,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
Tgl Data : 24/01/25 6:53 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 3:05 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	802,675,424	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	241,030,917	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	593,005,287	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,091,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,588,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	158,036,578	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	318,060,190	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	136,117,897	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	21,088,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	7,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,487,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	873,165,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	255,571,201	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176,720,278	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	144,791,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	390,236,384	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,415,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	321,660,848	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473,063,775	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	3,789,304	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,275,094	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,974,880	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	7,790,000	0
JUMLAH			40,981,354,417	40,981,354,417

Keterangan :
FINAL
Wakatobi, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHAIRUDIN ISMAN, S.S.T.PI., M.DEV.PRAC
NIP. 197612042005021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 ESELON I : 12 WILAYAH/PROVINSI : 2000 SATUAN KERJA : 352595 JENIS SATUAN KERJA : KD	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN SULAWESI TENGGARA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Kode Lap : LRA.B.S.2 Tanggal : 24/01/25 3:14 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM
---	---	---

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	623,850,000	560,448,000	560,362,800	0	560,362,800	99.98	85,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	14,000	5,392	0	5,392	38.51	8,608
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,816,000	39,930,000	39,906,850	0	39,906,850	99.94	23,150
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,062,000	13,650,000	13,637,700	0	13,637,700	99.91	12,300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,500,000	98,350,000	98,350,000	0	98,350,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,458,000	6,267,000	6,172,201	0	6,172,201	98.49	94,799
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,325,000	32,010,000	32,009,640	0	32,009,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	134,469,000	79,750,000	74,796,000	300,000	74,496,000	93.41	5,254,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,465,000	3,435,000	3,415,000	0	3,415,000	99.42	20,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	54,054,000	50,580,000	50,567,700	0	50,567,700	99.98	12,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,026,573,000	891,994,000	886,783,283	300,000	886,483,283	99.38	5,510,717
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	139,706,000	172,652,000	172,650,800	0	172,650,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	7,000	3,048	0	3,048	43.54	3,952
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,659,000	4,710,000	4,674,740	0	4,674,740	99.25	35,260
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,465,000	1,788,000	1,746,220	0	1,746,220	97.66	41,780
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,750,000	20,940,000	20,940,000	0	20,940,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,044,000	6,818,000	6,807,480	0	6,807,480	99.85	10,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33,300,000	30,800,000	29,958,000	0	29,958,000	97.27	842,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203,931,000	237,715,000	236,780,288	0	236,780,288	99.61	934,712
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	968,502,000	802,847,000	802,675,424	0	802,675,424	99.98	171,576
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	206,550,000	242,000,000	241,030,917	0	241,030,917	99.6	969,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,175,052,000	1,044,847,000	1,043,706,341	0	1,043,706,341	99.89	1,140,659
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,405,556,000	2,174,556,000	2,167,269,912	300,000	2,166,969,912	99.65	7,586,088
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	558,974,000	593,548,000	593,005,287	0	593,005,287	99.91	542,713
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	1,091,300	0	1,091,300	72.75	408,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,120,000	57,996,000	56,588,000	0	56,588,000	97.57	1,408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	650,594,000	653,044,000	650,684,587	0	650,684,587	99.64	2,359,413

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	153,552,000	163,646,000	158,036,578	0	158,036,578	96.57	5,609,422
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,260,000	9,000,000	8,160,000	0	8,160,000	90.67	840,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	275,608,000	321,282,000	318,060,190	0	318,060,190	99	3,221,810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	439,420,000	493,928,000	484,256,768	0	484,256,768	98.04	9,671,232
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	35,000,000	34,347,130	0	34,347,130	98.13	652,870
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	21,000,000	27,800,000	27,395,000	0	27,395,000	98.54	405,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	56,000,000	62,800,000	61,742,130	0	61,742,130	98.32	1,057,870
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	138,000,000	136,117,897	0	136,117,897	98.64	1,882,103
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,000,000	21,600,000	21,088,500	0	21,088,500	97.63	511,500
522141	Belanja Sewa	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,850,000	18,947,000	16,487,000	0	16,487,000	87.02	2,460,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	964,000,000	906,230,000	873,165,900	0	873,165,900	96.35	33,064,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,193,350,000	1,092,277,000	1,054,359,297	0	1,054,359,297	96.53	37,917,703
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390,196,000	255,766,000	255,571,201	0	255,571,201	99.92	194,799
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,050,000	178,880,000	176,720,278	0	176,720,278	98.79	2,159,722
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	40,000,000	145,000,000	144,791,000	0	144,791,000	99.86	209,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	594,246,000	579,646,000	577,082,479	0	577,082,479	99.56	2,563,521
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	342,214,000	390,729,000	390,236,384	0	390,236,384	99.87	492,616
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,350,000	18,750,000	11,415,000	0	11,415,000	60.88	7,335,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	361,564,000	409,479,000	401,651,384	0	401,651,384	98.09	7,827,616
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,295,174,000	3,291,174,000	3,229,776,645	0	3,229,776,645	98.13	61,397,355
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	134,200,000	134,200,000	0	0	0	0	134,200,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,365,800,000	1,365,800,000	0	0	0	0	1,365,800,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 12
: 2000
: 352595
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,511,599,000	1,511,599,000	11,599,000	0	11,599,000	0.77	1,500,000,000
	JUMLAH BELANJA	7,212,329,000	6,977,329,000	5,408,645,557	300,000	5,408,345,557	77.51	1,568,983,443

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:12 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	623,850,000	560,448,000	560,362,800	0	560,362,800	99.98	85,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	14,000	5,392	0	5,392	38.51	8,608
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,816,000	39,930,000	39,906,850	0	39,906,850	99.94	23,150
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,062,000	13,650,000	13,637,700	0	13,637,700	99.91	12,300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,500,000	98,350,000	98,350,000	0	98,350,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,458,000	6,267,000	6,172,201	0	6,172,201	98.49	94,799
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,325,000	32,010,000	32,009,640	0	32,009,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	134,469,000	79,750,000	74,796,000	300,000	74,496,000	93.41	5,254,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,465,000	3,435,000	3,415,000	0	3,415,000	99.42	20,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	54,054,000	50,580,000	50,567,700	0	50,567,700	99.98	12,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,026,573,000	891,994,000	886,783,283	300,000	886,483,283	99.38	5,510,717
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	139,706,000	172,652,000	172,650,800	0	172,650,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	7,000	3,048	0	3,048	43.54	3,952
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,659,000	4,710,000	4,674,740	0	4,674,740	99.25	35,260
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,465,000	1,788,000	1,746,220	0	1,746,220	97.66	41,780
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,750,000	20,940,000	20,940,000	0	20,940,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,044,000	6,818,000	6,807,480	0	6,807,480	99.85	10,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33,300,000	30,800,000	29,958,000	0	29,958,000	97.27	842,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203,931,000	237,715,000	236,780,288	0	236,780,288	99.61	934,712
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	968,502,000	802,847,000	802,675,424	0	802,675,424	99.98	171,576
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	206,550,000	242,000,000	241,030,917	0	241,030,917	99.6	969,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,175,052,000	1,044,847,000	1,043,706,341	0	1,043,706,341	99.89	1,140,659
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,405,556,000	2,174,556,000	2,167,269,912	300,000	2,166,969,912	99.65	7,586,088
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	558,974,000	593,548,000	593,005,287	0	593,005,287	99.91	542,713
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	1,091,300	0	1,091,300	72.75	408,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,120,000	57,996,000	56,588,000	0	56,588,000	97.57	1,408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	650,594,000	653,044,000	650,684,587	0	650,684,587	99.64	2,359,413

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:12 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	153,552,000	163,646,000	158,036,578	0	158,036,578	96.57	5,609,422
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,260,000	9,000,000	8,160,000	0	8,160,000	90.67	840,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	275,608,000	321,282,000	318,060,190	0	318,060,190	99	3,221,810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	439,420,000	493,928,000	484,256,768	0	484,256,768	98.04	9,671,232
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	35,000,000	34,347,130	0	34,347,130	98.13	652,870
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	21,000,000	27,800,000	27,395,000	0	27,395,000	98.54	405,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	56,000,000	62,800,000	61,742,130	0	61,742,130	98.32	1,057,870
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	138,000,000	136,117,897	0	136,117,897	98.64	1,882,103
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,000,000	21,600,000	21,088,500	0	21,088,500	97.63	511,500
522141	Belanja Sewa	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,850,000	18,947,000	16,487,000	0	16,487,000	87.02	2,460,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	964,000,000	906,230,000	873,165,900	0	873,165,900	96.35	33,064,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,193,350,000	1,092,277,000	1,054,359,297	0	1,054,359,297	96.53	37,917,703
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390,196,000	255,766,000	255,571,201	0	255,571,201	99.92	194,799
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,050,000	178,880,000	176,720,278	0	176,720,278	98.79	2,159,722
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	40,000,000	145,000,000	144,791,000	0	144,791,000	99.86	209,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	594,246,000	579,646,000	577,082,479	0	577,082,479	99.56	2,563,521
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	342,214,000	390,729,000	390,236,384	0	390,236,384	99.87	492,616
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,350,000	18,750,000	11,415,000	0	11,415,000	60.88	7,335,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	361,564,000	409,479,000	401,651,384	0	401,651,384	98.09	7,827,616
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,295,174,000	3,291,174,000	3,229,776,645	0	3,229,776,645	98.13	61,397,355
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	134,200,000	134,200,000	0	0	0	0	134,200,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,365,800,000	1,365,800,000	0	0	0	0	1,365,800,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 12
: 2000
: 352595
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:12 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,511,599,000	1,511,599,000	11,599,000	0	11,599,000	0.77	1,500,000,000
	JUMLAH BELANJA	7,212,329,000	6,977,329,000	5,408,645,557	300,000	5,408,345,557	77.51	1,568,983,443

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:15 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	623,850,000	560,448,000	560,362,800	0	560,362,800	99.98	85,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	14,000	5,392	0	5,392	38.51	8,608
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,816,000	39,930,000	39,906,850	0	39,906,850	99.94	23,150
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,062,000	13,650,000	13,637,700	0	13,637,700	99.91	12,300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,500,000	98,350,000	98,350,000	0	98,350,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,458,000	6,267,000	6,172,201	0	6,172,201	98.49	94,799
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,325,000	32,010,000	32,009,640	0	32,009,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	134,469,000	79,750,000	74,796,000	300,000	74,496,000	93.41	5,254,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,465,000	3,435,000	3,415,000	0	3,415,000	99.42	20,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	54,054,000	50,580,000	50,567,700	0	50,567,700	99.98	12,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,026,573,000	891,994,000	886,783,283	300,000	886,483,283	99.38	5,510,717
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	139,706,000	172,652,000	172,650,800	0	172,650,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	7,000	3,048	0	3,048	43.54	3,952
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,659,000	4,710,000	4,674,740	0	4,674,740	99.25	35,260
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,465,000	1,788,000	1,746,220	0	1,746,220	97.66	41,780
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,750,000	20,940,000	20,940,000	0	20,940,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,044,000	6,818,000	6,807,480	0	6,807,480	99.85	10,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33,300,000	30,800,000	29,958,000	0	29,958,000	97.27	842,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203,931,000	237,715,000	236,780,288	0	236,780,288	99.61	934,712
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	968,502,000	802,847,000	802,675,424	0	802,675,424	99.98	171,576
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	206,550,000	242,000,000	241,030,917	0	241,030,917	99.6	969,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,175,052,000	1,044,847,000	1,043,706,341	0	1,043,706,341	99.89	1,140,659
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,405,556,000	2,174,556,000	2,167,269,912	300,000	2,166,969,912	99.65	7,586,088
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	558,974,000	593,548,000	593,005,287	0	593,005,287	99.91	542,713
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	1,091,300	0	1,091,300	72.75	408,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,120,000	57,996,000	56,588,000	0	56,588,000	97.57	1,408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	650,594,000	653,044,000	650,684,587	0	650,684,587	99.64	2,359,413

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:15 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	153,552,000	163,646,000	158,036,578	0	158,036,578	96.57	5,609,422
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,260,000	9,000,000	8,160,000	0	8,160,000	90.67	840,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	275,608,000	321,282,000	318,060,190	0	318,060,190	99	3,221,810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	439,420,000	493,928,000	484,256,768	0	484,256,768	98.04	9,671,232
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	35,000,000	34,347,130	0	34,347,130	98.13	652,870
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	21,000,000	27,800,000	27,395,000	0	27,395,000	98.54	405,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	56,000,000	62,800,000	61,742,130	0	61,742,130	98.32	1,057,870
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	138,000,000	136,117,897	0	136,117,897	98.64	1,882,103
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,000,000	21,600,000	21,088,500	0	21,088,500	97.63	511,500
522141	Belanja Sewa	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,850,000	18,947,000	16,487,000	0	16,487,000	87.02	2,460,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	964,000,000	906,230,000	873,165,900	0	873,165,900	96.35	33,064,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,193,350,000	1,092,277,000	1,054,359,297	0	1,054,359,297	96.53	37,917,703
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390,196,000	255,766,000	255,571,201	0	255,571,201	99.92	194,799
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,050,000	178,880,000	176,720,278	0	176,720,278	98.79	2,159,722
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	40,000,000	145,000,000	144,791,000	0	144,791,000	99.86	209,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	594,246,000	579,646,000	577,082,479	0	577,082,479	99.56	2,563,521
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	342,214,000	390,729,000	390,236,384	0	390,236,384	99.87	492,616
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,350,000	18,750,000	11,415,000	0	11,415,000	60.88	7,335,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	361,564,000	409,479,000	401,651,384	0	401,651,384	98.09	7,827,616
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,295,174,000	3,291,174,000	3,229,776,645	0	3,229,776,645	98.13	61,397,355
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	134,200,000	134,200,000	0	0	0	0	134,200,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,365,800,000	1,365,800,000	0	0	0	0	1,365,800,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 12
: 2000
: 352595
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:15 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,511,599,000	1,511,599,000	11,599,000	0	11,599,000	0.77	1,500,000,000
	JUMLAH BELANJA	7,212,329,000	6,977,329,000	5,408,645,557	300,000	5,408,345,557	77.51	1,568,983,443

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 352595

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 24/01/25 3:13 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
WA	Program Dukungan Manajemen							
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4,581,310,000	4,346,310,000	4,320,835,027	300,000	4,320,535,027	99.41	25,774,973
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	4,581,310,000	4,346,310,000	4,320,835,027	300,000	4,320,535,027	99.41	25,774,973
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2,619,420,000	2,619,420,000	1,076,211,530	0	1,076,211,530	41.09	1,543,208,470
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	2,619,420,000	2,619,420,000	1,076,211,530	0	1,076,211,530	41.09	1,543,208,470
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	7,200,730,000	6,965,730,000	5,397,046,557	300,000	5,396,746,557	77.48	1,568,983,443
04	PNBP							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PNBP	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH	7,212,329,000	6,977,329,000	5,408,645,557	300,000	5,408,345,557	77.52	1,568,983,443

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 352595 **AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 2376 ABW 52 5212 521219	RUPIAH MURNI Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	45,000,000	45,000,000	44,313,840	0	44,313,840	98.48	686,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	45,000,000	45,000,000	44,313,840	0	44,313,840	98.48	686,160
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	45,000,000	45,000,000	44,313,840	0	44,313,840	98.48	686,160
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.ABW	45,000,000	45,000,000	44,313,840	0	44,313,840	98.475	686,160
QDD 52 5212 521211	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	45,850,000	45,850,000	42,200,000	0	42,200,000	92.04	3,650,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	45,850,000	45,850,000	42,200,000	0	42,200,000	92.04	3,650,000
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,150,000	12,150,000	6,300,000	0	6,300,000	51.85	5,850,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,150,000	12,150,000	6,300,000	0	6,300,000	51.85	5,850,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	58,000,000	58,000,000	48,500,000	0	48,500,000	83.62	9,500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.QDD	58,000,000	58,000,000	48,500,000	0	48,500,000	83.621	9,500,000
RBJ 53 5331 533115 533121	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi BELANJA MODAL Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	134,200,000 1,365,800,000	134,200,000 1,365,800,000	0 0	0 0	0 0	0 0	134,200,000 1,365,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.RBJ	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
SAC 52 5212 521211 521213 521219	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	103,562,000 2,100,000 230,608,000	113,656,000 840,000 276,282,000	113,119,578 0 273,746,350	0 0 0	113,119,578 0 273,746,350	99.53 0 99.08	536,422 840,000 2,535,650

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 352595 **AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	336,270,000	390,778,000	386,865,928	0	386,865,928	99	3,912,072
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,200,000	11,200,000	11,160,000	0	11,160,000	99.64	40,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	21,000,000	27,800,000	27,395,000	0	27,395,000	98.54	405,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	32,200,000	39,000,000	38,555,000	0	38,555,000	98.86	445,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,850,000	18,947,000	16,487,000	0	16,487,000	87.02	2,460,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	509,000,000	460,680,000	436,128,400	0	436,128,400	94.67	24,551,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	546,350,000	487,127,000	460,115,400	0	460,115,400	94.45	27,011,600
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94,400,000	92,915,000	92,746,362	0	92,746,362	99.82	168,638
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	6,600,000	5,115,000	0	5,115,000	77.5	1,485,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	101,600,000	99,515,000	97,861,362	0	97,861,362	98.34	1,653,638
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,016,420,000	1,016,420,000	983,397,690	0	983,397,690	96.75	33,022,310
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.SAC	1,016,420,000	1,016,420,000	983,397,690	0	983,397,690	96.751	33,022,310
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2376	2,619,420,000	2,619,420,000	1,076,211,530	0	1,076,211,530	41.09	1,543,208,470
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	623,850,000	560,448,000	560,362,800	0	560,362,800	99.98	85,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	14,000	5,392	0	5,392	38.51	8,608
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,816,000	39,930,000	39,906,850	0	39,906,850	99.94	23,150
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,062,000	13,650,000	13,637,700	0	13,637,700	99.91	12,300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,500,000	98,350,000	98,350,000	0	98,350,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,458,000	6,267,000	6,172,201	0	6,172,201	98.49	94,799
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,325,000	32,010,000	32,009,640	0	32,009,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	134,469,000	79,750,000	74,796,000	300,000	74,496,000	93.41	5,254,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,465,000	3,435,000	3,415,000	0	3,415,000	99.42	20,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	54,054,000	50,580,000	50,567,700	0	50,567,700	99.98	12,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,026,573,000	891,994,000	886,783,283	300,000	886,483,283	99.42	5,510,717
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 352595 **AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	139,706,000	172,652,000	172,650,800	0	172,650,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	7,000	3,048	0	3,048	43.54	3,952
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,659,000	4,710,000	4,674,740	0	4,674,740	99.25	35,260
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,465,000	1,788,000	1,746,220	0	1,746,220	97.66	41,780
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,750,000	20,940,000	20,940,000	0	20,940,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,044,000	6,818,000	6,807,480	0	6,807,480	99.85	10,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33,300,000	30,800,000	29,958,000	0	29,958,000	97.27	842,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203,931,000	237,715,000	236,780,288	0	236,780,288	99.61	934,712
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	968,502,000	802,847,000	802,675,424	0	802,675,424	99.98	171,576
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	206,550,000	242,000,000	241,030,917	0	241,030,917	99.6	969,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,175,052,000	1,044,847,000	1,043,706,341	0	1,043,706,341	99.89	1,140,659
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,405,556,000	2,174,556,000	2,167,269,912	300,000	2,166,969,912	99.66	7,586,088
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	558,974,000	593,548,000	593,005,287	0	593,005,287	99.91	542,713
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	1,091,300	0	1,091,300	72.75	408,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,120,000	57,996,000	56,588,000	0	56,588,000	97.57	1,408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	650,594,000	653,044,000	650,684,587	0	650,684,587	99.64	2,359,413
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,000,000	7,000,000	6,756,000	0	6,756,000	96.51	244,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,000,000	7,000,000	6,756,000	0	6,756,000	96.51	244,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	138,000,000	136,117,897	0	136,117,897	98.64	1,882,103
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,000,000	21,600,000	21,088,500	0	21,088,500	97.63	511,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	455,000,000	445,550,000	437,037,500	0	437,037,500	98.09	8,512,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	647,000,000	605,150,000	594,243,897	0	594,243,897	98.2	10,906,103
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390,196,000	255,766,000	255,571,201	0	255,571,201	99.92	194,799
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,050,000	178,880,000	176,720,278	0	176,720,278	98.79	2,159,722
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	40,000,000	145,000,000	144,791,000	0	144,791,000	99.86	209,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 352595 **AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	594,246,000	579,646,000	577,082,479	0	577,082,479	99.56	2,563,521
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	149,311,000	199,311,000	199,238,687	0	199,238,687	99.96	72,313
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	149,311,000	199,311,000	199,238,687	0	199,238,687	99.96	72,313
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,056,311,000	2,052,311,000	2,036,165,650	0	2,036,165,650	99.21	16,145,350
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2378.EBA	4,461,867,000	4,226,867,000	4,203,435,562	300,000	4,203,135,562	99.446	23,731,438
EBD 52 5212 521211	Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	4,140,000	4,140,000	2,717,000	0	2,717,000	65.63	1,423,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,140,000	4,140,000	2,717,000	0	2,717,000	65.63	1,423,000
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,800,000	16,800,000	16,431,130	0	16,431,130	97.8	368,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	16,800,000	16,800,000	16,431,130	0	16,431,130	97.8	368,870
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98,503,000	98,503,000	98,251,335	0	98,251,335	99.74	251,665
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	98,503,000	98,503,000	98,251,335	0	98,251,335	99.74	251,665
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	119,443,000	119,443,000	117,399,465	0	117,399,465	98.29	2,043,535
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2378.EBD	119,443,000	119,443,000	117,399,465	0	117,399,465	98.289	2,043,535
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2378	4,581,310,000	4,346,310,000	4,320,835,027	300,000	4,320,535,027	99.41	25,774,973
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	7,200,730,000	6,965,730,000	5,397,046,557	300,000	5,396,746,557	77.48	1,568,983,443
04 2376 RAA 53 5321 532111	PNBP Pendidikan Kelautan dan Perikanan Sarana Bidang Pendidikan BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.RAA	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2376	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	11,599,000	11,599,000	11,599,000	0	11,599,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 12
: 032122000KD
: 352595
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/01/25 3:14 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	7,212,329,000	6,977,329,000	5,408,645,557	300,000	5,408,345,557	77.52	1,568,983,443

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2000 **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 352595 **AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/01/25 3:13 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	6,087,000	2,700,000	0	2,700,000	44.36
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,840,000	8,790,000	0	8,790,000	128.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	12,927,000	11,490,000	0	11,490,000	88.88
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	2,750,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	2,750,000	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	360,227	0	360,227	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	360,227	0	360,227	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	622,585	0	622,585	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,245,590	0	8,245,590	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,868,175	0	8,868,175	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	15,677,000	20,718,402	0	20,718,402	132.16
	JUMLAH PENDAPATAN	15,677,000	20,718,402	0	20,718,402	132.16

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 2000

SATUAN KERJA : 352595

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

SULAWESI TENGGARA

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl. Cetak 24/01/2025 3:14 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,094,750	0
0.0	131111	Tanah	9,141,918,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,762,873,477	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	0
0.0	134112	Irigasi	130,731,000	0
0.0	134113	Jaringan	106,973,730	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	42,600,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,738,942,674
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,837,132,638
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	22,735,824
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,641,822
0.0	391111	Ekuitas	0	29,127,048,479
JUMLAH			34,750,501,437	34,750,501,437



Ditjen Pajak

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	28/07/2024
Waktu Transaksi	16:20:44 WIB
Tanggal Buku	29/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	591833424131
STAN	821227
Kode Billing	029070963413059
NPWP	953716263816000
Nama Wajib Pajak	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
Alamat Wajib Pajak	JL SOEKARNO HATTA - KAB. WAKATOBI
Jumlah Detil	1
Jumlah Setoran	190.270
Mata Uang	IDR
NTPN	94AEB2M2TI5CC423
Total Pembayaran	Rp190.270
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah
Nomor Rekening	*****258

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:31:22 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	998938419706
STAN	430841
Kode Billing	820240724118344
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	760.000
Mata Uang	IDR
NTPN	563C31JNFV8S8IQ8
Total Pembayaran	Rp760.000
Terbilang	tujuh ratus enam puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:29:45 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	777536378741
STAN	430416
Kode Billing	820240724118533
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	180.000
Mata Uang	IDR
NTPN	F555248VVF01FJ05
Total Pembayaran	Rp180.000
Terbilang	seratus delapan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi 24/07/2024

Waktu Transaksi 11:25:01 WIB

Tanggal Buku 24/07/2024

Institusi Penerimaan Negara

NTB 734717242666

STAN 429147

Kode Billing 820240724104299

Nama Wajib Bayar
AKADEMI KOMUNITAS
KELAUTAN DAN
PERIKANAN WAKATOBI

Kementerian /
Lembaga 032

Unit Eselon I 12

Satuan Kerja 352595

Nominal Tagihan 90.585

Mata Uang IDR

NTPN 452D93CIFKDL253B

Total Pembayaran Rp90.585

Terbilang sembilan puluh ribu lima
ratus delapan puluh lima
rupiah

Nomor Rekening *****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:23:02 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	659787176536
STAN	428617
Kode Billing	820240724091266
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	532.000
Mata Uang	IDR
NTPN	521A061QV44Q8OC2
Total Pembayaran	Rp532.000
Terbilang	lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:26:12 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	505778285402
STAN	429429
Kode Billing	702407241220960
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	185.000
Mata Uang	IDR
NTPN	6323C0JUQNN1JGR0
Total Pembayaran	Rp185.000
Terbilang	seratus delapan puluh lima ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:27:27 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	369724320423
STAN	429789
Kode Billing	702407241221018
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	74.000
Mata Uang	IDR
NTPN	B14C17NAPCA4RGSQ
Total Pembayaran	Rp74.000
Terbilang	tujuh puluh empat ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258



Download



Share

Kembali ke Beranda

Status



Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	24/07/2024
Waktu Transaksi	11:28:30 WIB
Tanggal Buku	24/07/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	578463342355
STAN	430071
Kode Billing	702407241220998
Nama Wajib Bayar	AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon I	12
Satuan Kerja	352595
Nominal Tagihan	41.000
Mata Uang	IDR
NTPN	B73A20JUQNN1JGS6
Total Pembayaran	Rp41.000
Terbilang	empat puluh satu ribu rupiah
Nomor Rekening	*****258

Download

Share

Kembali ke Beranda



NPWP : 95.371.626.3-816.000
NAMA : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA - KAB. WAKATOBI

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.190.270
TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah

URAIAN : Pembayaran kekurangan bayar atas SPM Nomor 00024A dan 00025A TGL
1/3/2023

NPWP PENYETOR : 95.371.626.3-816.000
NAMA PENYETOR : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0290 7096 3413 059
MASA AKTIF : 25/08/2024 20:13:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724136521
Tanggal Billing : 24-07-2024 12:25:28
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 12:25:28
Tanggal Bayar : **26-07-2024 19:31:21**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 1.264.317 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **892116243089**
NTPN : **2FD6C55DF9IDT4I9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.264.317 (IDR)
Keterangan : Kelebihan bayar Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B dan Rektorat oleh CV Aisyah Dwi Putri TA.2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724137328
Tanggal Billing : 24-07-2024 12:28:49
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 12:28:49
Tanggal Bayar : **26-07-2024 19:29:46**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 1.690.678 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **605666201189**
NTPN : **1C1906U8EUN6N5BG**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.690.678 (IDR)
Keterangan : Kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan pagar permanen TA. 2023 CV. Wakatobi Sejahtera



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724134690
Tanggal Billing : 24-07-2024 12:19:21
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 12:19:21
Tanggal Bayar : **26-07-2024 19:32:40**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 3.140.595 (IDR)
Terbilang : *Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **749667281070**
NTPN : **147A07QLUP9J42P2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 3.140.595 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN BAYAR PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK MELEBIHI SBM TA 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724118344
Tanggal Billing : 24-07-2024 11:13:45
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 11:13:45
Tanggal Bayar : **24-07-2024 11:31:22**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 760.000 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **998938419706**
NTPN : **563C31JNFV8S8IQ8**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 760.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00253A DESEMBER 2023 AN. INDAH ALSITA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240724119738
Tanggal Billing	:	24-07-2024 11:16:32
Tanggal Kedaluwarsa	:	31-07-2024 11:16:32
Tanggal Bayar	:	26-07-2024 09:50:32
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga	:	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I	:	12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satuan Kerja	:	352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
Total Disetor	:	450.000 (IDR)
Terbilang	:	<i>Empat Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	755923748694
NTPN	:	C1E563CIFKDL2K5Q

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	450.000 (IDR)
Keterangan	:	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00232A NOVEMBER 2023 AN. KHAIRUDIN ISMAN



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240724118533
Tanggal Billing	:	24-07-2024 11:15:21
Tanggal Kedaluwarsa	:	31-07-2024 11:15:21
Tanggal Bayar	:	24-07-2024 11:29:45
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga	:	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I	:	12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satuan Kerja	:	352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
Total Disetor	:	180.000 (IDR)
Terbilang	:	<i>Seratus Delapan Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	777536378741
NTPN	:	F555248VVF01FJ05

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	180.000 (IDR)
Keterangan	:	KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00235A NOVEMBER 2023 AN. LA ODE MANSYUR



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724118217
Tanggal Billing : 24-07-2024 11:12:06
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 11:12:06
Tanggal Bayar : **25-07-2024 06:42:31**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 760.000 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **838390367340**
NTPN : **6510E61QV44Q9IM9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 760.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO SPM00274A DESEMBER 2023 AN. LA ODE MUH. NORSA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724104299
Tanggal Billing : 24-07-2024 10:30:45
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 10:30:45
Tanggal Bayar : **24-07-2024 11:25:01**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 90.585 (IDR)
Terbilang : *Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **734717242666**
NTPN : **452D93CIFKDL253B**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 30.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. ALFI KUSUMA ADMAJA

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 30.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. LA ODE MANSYUR

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 30.585 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2023 AN. AHMAD YASIN



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240724091266
Tanggal Billing : 24-07-2024 09:48:22
Tanggal Kedaluwarsa : 31-07-2024 09:48:22
Tanggal Bayar : **24-07-2024 11:23:02**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 532.000 (IDR)
Terbilang : *Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **659787176536**
NTPN : **521A061QV44Q8OC2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 41.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN SEPTEMBER 2023 AN. Sariamini Sahari

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 185.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN AGUSTUS 2023 AN. LaOde Muhammad Norsa

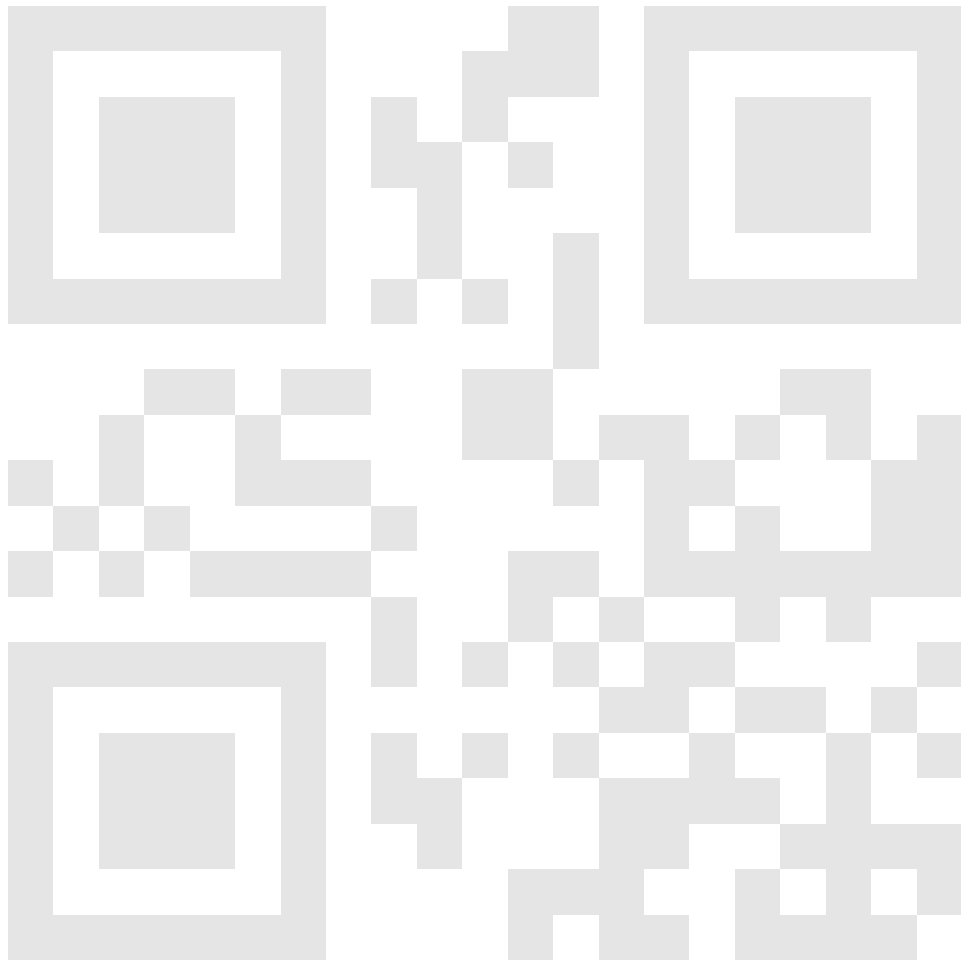
Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 74.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN APRIL 2023 AN. KeziaGloria Apriliana Runtu

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 123.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN SEPTEMBER 2023 AN. LaOde Muhammad Mansyur

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 74.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN APRIL 2023
AN.AhmadYasin

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 35.000 (IDR)
Keterangan : KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BULAN AGUSTUS 2023
AN.Mohammad Fattah Alfian





BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702407241220960	Pembuat Billing Mohammad Fattah Alfian, A.Md. Lib	NTPN 6323C0JUQNN1JGR0
Tanggal Billing 24-07-2024 10:07:40	Kementerian / Lembaga 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NTB 505778285402
Tanggal Kadaluwarsa 31-07-2024 10:07:40	Unit Eselon I 12 - BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tanggal Bayar 24-07-2024 11:26:12
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BERUPA UANG MAKAN BULAN JANUARI 2024 AN. KHAIRUDIN ISMAN		Kanal Bayar 7015 - Mobile Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI NPWP 953716263816000	Kab/ Kota KAB. WAKATOBI Periode JANUARI 2024	511129 03212WA.2378EBA	185.000,00

Total Disetor IDR 185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702407241221018	Pembuat Billing Mohammad Fattah Alfian, A.Md. Lib	NTPN B14C17NAPCA4RGSQ
Tanggal Billing 24-07-2024 10:12:31	Kementerian / Lembaga 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NTB 369724320423
Tanggal Kadaluwarsa 31-07-2024 10:12:31	Unit Eselon I 12 - BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tanggal Bayar 24-07-2024 11:27:27
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BERUPA UANG MAKAN BULAN JANUARI 2024 AN. NORMAYASARI		Kanal Bayar 7015 - Mobile Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI NPWP 953716263816000	Kab/ Kota KAB. WAKATOBI Periode JANUARI 2024	511129 03212WA.2378EBA	74.000,00

Total Disetor IDR 74.000,00

(Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702407241220998	Pembuat Billing Mohammad Fattah Alfian, A.Md. Lib	NTPN B73A20JUQNN1JGS6
Tanggal Billing 24-07-2024 10:10:37	Kementerian / Lembaga 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NTB 578463342355
Tanggal Kadaluwarsa 31-07-2024 10:10:37	Unit Eselon I 12 - BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tanggal Bayar 24-07-2024 11:28:30
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BERUPA UANG MAKAN BULAN JANUARI 2024 AN. SARIAMIN SAHARI		Kanal Bayar 7015 - Mobile Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI NPWP 953716263816000	Kab/ Kota KAB. WAKATOBI Periode JANUARI 2024	511129 03212WA.2378EBA	41.000,00

Total Disetor IDR 41.000,00

(Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-84/AG/AG.3/2024 29 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengesahan Revisi Ke-1 DIPA TA 2024 Satker Lingkup BRSDMKP KKP

Yth. 1. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP KKP)
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan a.n Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-SJ/RC.420/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2024 dan surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Nomor B.162/BPPSDM/RC.420/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Usulan Revisi *Automatic Adjustment* (AA) BPPSDMKP TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Usulan revisi anggaran dalam rangka *automatic adjustment* Satker lingkup BRSDMKP sebesar **Rp56.620.338.000,-** telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
- b. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah sebagaimana terlampir.
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
- d. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan **SOLUTIF (Sinergi, Objektif, Lugas, Transparan, dan InovatiF)** dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti



Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat

Nomor : S-84 /AG/AG.3/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**REKAP PERUBAHAN DIGITAL STAMP
BRSDMKP KKP**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Digital Stamp Baru	Digital Stamp Lama
1	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	6004-2300-3609-6004	1565-5098-0717-5242
2	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	6758-1366-6840-3499	8746-0858-8220-9049
3	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	7097-6072-3005-7636	4662-3400-4718-3456
4	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	5752-7802-1662-3677	0612-0063-1954-0079
5	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	9759-2530-8610-9846	2211-0348-0250-9941
6	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	2987-0803-2265-3626	2987-0803-2265-3626
7	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	4074-5721-4880-8805	2309-5741-0411-9948
8	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	0765-8344-2597-0506	1160-1033-9500-1086
9	403821	PUSAT RISET PERIKANAN	3180-0843-1017-6720	0803-3776-4793-4846
10	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	9597-6523-3873-7700	9436-8065-6703-0044
11	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0946-0907-6386-5069	3954-6411-1652-0631
12	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	4808-8810-7168-3413	2056-9910-7049-0280
13	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	3914-0022-7539-8135	0790-1669-0181-4769
14	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0030-6800-0854-7421	9892-3313-2575-3703
15	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1	Rev No
16	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8421-0240-2602-0082	1451-4900-7331-0987
17	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	7027-4308-7809-4023	4070-1290-6100-0804
18	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	1513-5018-5926-7129	0174-9388-7090-3020
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	5009-7001-7233-0930	2227-7307-4964-0270
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	7166-3091-1201-2280	6703-5471-3445-9191
21	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	7955-2164-2880-9770	0014-0021-5500-0355
22	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6108-3106-5647-4406	2249-6049-6490-7701
23	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	3979-0323-0462-9580	1127-0094-4855-3246
24	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	0407-5006-6750-4350	5493-0869-9556-6476
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	6674-0092-9057-9006	4168-7496-8000-1449
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	0482-1040-3295-7290	7382-6517-8817-5033
27	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	0197-7103-0749-7693	4709-0140-7730-7322
28	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	0079-6346-9359-6439	0703-0300-8499-8502
29	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1709-3068-8827-4600	7406-3364-9012-9601
30	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	6528-2180-5937-8337	9048-9951-8198-2220
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	3280-9042-6909-7269	1143-0437-0140-6112
32	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7176-3794-0490-6335	4763-7141-7386-8660



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI
SELATAN, KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAM www.kkp.go.id SUREL akpp.wakatobi@kkp.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : B.124/AKPP.WKTB/KU.110/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairudin Isman, S.ST.Pi, M.Dev.Prac

NIP : 19761204200502 1 001

Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

Dalam rangka pengajuan usulan revisi anggaran sesuai surat kami Nomor : B.123/AKPP.WKTB/RC.420/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, hal *Permohonan Usulan Blokir Anggaran*, dengan ini kami menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan dan menyelesaikan atas Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan;
2. Bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan revisi anggaran yang diajukan;
3. Usulan revisi anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
4. Dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka revisi anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, serta disimpan oleh Satker, dan siap untuk diaudit;
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan merupakan harga yang paling ekonomis;
6. Revisi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan;

7. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara;
8. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, kami siap bertanggung jawab.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Wakatobi, 18 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Khairul Hisman

Tembusan :
Sekretaris BRSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

Nomor : B.153/BPPSDM.4/RC.210/I/2024
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Revisi Blokir *Automatic Adjustment* (AA)
Pendidikan KP Tahun 2024

18 Januari 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Penyampaian Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* (AA) BPPSDMKP TA 2024, bersama ini kami sampaikan pagu blokir anggaran *Automatic Adjustment* (AA) Pendidikan KP sebesar Rp 12.412.597.000 sebagaimana terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Blokir dilakukan terhadap sumber dana Rupiah Murni tanpa pengurangan volume output
2. Pra penelaahan Eselon I oleh DJA akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 22 Januari 2024 usulan revisi lingkup Eselon I akan disampaikan kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu
3. Terkait hal tersebut maka Saudara agar segera menyampaikan usulan revisi blokir anggaran beserta data dukung sebagai bahan reuiv oleh Tim Auditor Inspektorat I paling lambat tanggal 18 Januari 2024 melalui tautan: <https://bit.ly/AAPendidikan2024>

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala BPPSDM
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan
Kepala BPPSDM KP.

Lampiran Surat

Nomor : B.153/BPPSDM.4/RC.210/I/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Daftar Terlampir:

1. Direktur Politeknik AUP Jakarta;
2. Direktur Politeknik KP Sidoarjo;
3. Direktur Politeknik KP Karawang;
4. Direktur Politeknik KP Bone;
5. Direktur Politeknik KP Kupang;
6. Direktur Politeknik KP Dumai;
7. Direktur Politeknik KP Jemberana;
8. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi;
9. Kepala SUPM Ladong;
10. Kepala SUPM Pariaman.

a.n. Kepala BPPSDM
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudi Alek Wahyudin

**PAGU BLOKIR AUTOMATIC ADJUSTMENT (AA)
ANGGARAN PENDIDIKAN KP TAHUN 2024**

KODE	URAIAN	VOL	SAT	JUMLAH	KODE BLOKIR
1	Politeknik AUP			4.665.754.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	4.477.420.000	*
2376.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	188.334.000	*
2	Politeknik KP Sidoarjo			2.413.921.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	700.000.000	*
2376.RBJ.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	unit	1.713.921.000	*
3	Politeknik KP Karawang			200.000.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	200.000.000	*
4	Politeknik KP Bone			565.577.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	465.577.000	*
2376.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	100.000.000	*
5	Politeknik KP Kupang			1.700.000.000	9
2376.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	100.000.000	*
2376.RBJ.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	unit	1.600.000.000	*
6	Politeknik KP Dumai			67.345.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	67.345.000	*
7	Politeknik KP Jembrana			100.000.000	9
2376.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	100.000.000	*
8	AK KP Wakatobi			1.500.000.000	9
2376.RBJ.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	unit	1.500.000.000	*
9	SUPM Ladong			500.000.000	9
2376.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	100.000.000	*
2376.RBI.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	unit	400.000.000	*
10	SUPM Pariaman			300.000.000	9
2376.RAA.001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	1	Unit	100.690.000	*
2376.RBI.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	unit	199.310.000	*
11	Pusat Pendidikan KP			400.000.000	9
2378.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Riset dan SDM KP	1	Unit	200.000.000	*
2378.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	200.000.000	*
Total				12.412.597.000	

a.n. Kepala BPPSDM
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudi Alek Wahyudin

**Teknis Usulan Revisi Blokir Anggaran
Automatic Adjustment (AA) Tahun 2024**

1. Anggaran yang diblokir, dikelompokkan pada sub-komponen tersendiri pada Rincian Output (RO)/Komponen asal, dengan kode sub-komponen ZA sampai ZZ serta diberi penanda/tagging “(Blokir AA)” dan volume yang terblokir (jika ada).
Contoh:
 - ZA. Pelatihan Budiddaya bagi Masyarakat (Blokir AA) volume 100 orang
 - ZB. Pelatihan Pengolahan bagi Masyarakat (Blokir AA) volume 100 orang
 - ZC. Dan seterusnya
2. Blokir anggaran menggunakan kode 9
3. Data dukung yang harus dilengkapi:
 - a. KAK
 - b. RAB
 - c. Matrik Semula Menjadi
 - d. Surat usulan revisi
 - e. SPTJM
 - f. Data dukung terkait lainnya



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI
SELATAN, KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAR www.kkp.go.id SUREL akkp.wakatobi@kkp.go.id

Nomor : B.123/AKKP.WKTB/RC.420/II/2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Blokir Anggaran

Yth.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan KP

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tanggal 18 Januari 2024 perihal Revisi Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Pendidikan KP Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan usulan Blokir Anggaran Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Buka Blokir RO Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2376.RBJ.001) yang terdiri dari detail :
 - Buka Blokir Akun (533115 - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan) berupa Biaya Perancangan (Design) Konstruksi sebesar Rp.67.100.000 sebanyak 1 Paket, Biaya Pengawasan (Supervisi) Konstruksi sebesar Rp.67.100.000 sebanyak 1 Paket (2376.RBJ.51.A)
 - Buka Blokir Akun (533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) berupa Biaya Pembangunan Konstruksi sebesar Rp. 1.365.800.000 sebanyak 1 Unit (2376.RBJ.51.A)

Wakatobi, 18 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Khairuddin Isman

Tembusan :

Sekretaris BRSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAN www.kkp.go.id SUREL akpp.wakatobi@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA TERMIN SATU PENELITIAN ANALISIS
PENERAPAN MEDIA *CORAL TREE* UNTUK KEGIATAN REHABILITASI TERUMBU
KARANG JENIS *ACROPORA CERVICORNIS* DI PERAIRAN WAKATOBI,
SULAWESI TENGGARA
NOMOR B.1116/AKKP.WKTB/RSDM.450/VI/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat bertempat di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Desa Matahora Kabupaten Wakatobi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Muhammad Musrianton, M.Si
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan dana penelitian terapan institusi termin satu yang telah dilakukan penarikan dari Bank sejumlah Rp. 13.997.865 selanjutnya untuk dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan dana penelitian termin satu yang diserahkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan penelitian terapan serta melaporkan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, maka tanggung jawab pengelolaan dana penelitian tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini dibuat rangkap 2 (dua), dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Peneliti Akademi Komunitas
Kelautan dan Perikanan Wakatobi,



Muhammad Musrianton

Wakatobi, 13 Juni 2024

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran
Akademi Komunitas Kelautan dan
Perikanan Wakatobi,



Khairudin Isman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

LAMAM www.kkp.go.id SUREL akkp.wakatobi@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA TERMIN SATU PENELITIAN ANALISIS
PENERAPAN MEDIA *CORAL TREE* UNTUK KEGIATAN REHABILITASI TERUMBU
KARANG JENIS *ACROPORA CERVICORNIS* DI PERAIRAN WAKATOBI,
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR B.1116/AKKP.WKTB/RSDM.450/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat bertempat di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Desa Matahora Kabupaten Wakatobi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Muhammad Musrianton, M.Si
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan dana penelitian terapan institusi termin satu yang telah dilakukan penarikan dari Bank sejumlah Rp. 13.997.865 selanjutnya untuk dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan dana penelitian termin satu yang diserahkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan penelitian terapan serta melaporkan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, maka tanggung jawab pengelolaan dana penelitian tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini dibuat rangkap 2 (dua), dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Peneliti Akademi Komunitas
Kelautan dan Perikanan Wakatobi,



Muhammad Musrianton

Wakatobi, 13 Juni 2024

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran
Akademi Komunitas Kelautan dan
Perikanan Wakatobi,




Khairudin Isman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAR www.kkp.go.id SUREL akpp.wakatobi@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA TERMIN SATU PENELITIAN
PENGUATAN KAWASAN KONSERVASI MELALUI REHABILITASI TERUMBU
KARANG MENGGUNAKAN METODE *WEB SPIDER* UNTUK MENDUKUNG
EKOWISATA PULAU MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
NOMOR B.1117/AKKP.WKTB/RSDM.450/VI/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat bertempat di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Desa Matahora Kabupaten Wakatobi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Nur Ikhsan, S.Pi., M.Si
Jabatan : Dosen Tetap Non PNS
Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan dana penelitian terapan institusi termin satu yang telah dilakukan penarikan dari Bank sejumlah Rp. 14.000.000 selanjutnya untuk dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan dana penelitian termin satu yang diserahkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan

penelitian terapan serta melaporkan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, maka tanggung jawab pengelolaan dana penelitian tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini dibuat rangkap 2 (dua), dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Peneliti Akademi Komunitas
Kelautan dan Perikanan Wakatobi,



Nur Ikhsan

Wakatobi, 13 Juni 2024

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran
Akademi Komunitas Kelautan dan
Perikanan Wakatobi,


Khairudin Isman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
LAMAN www.kkp.go.id SUREL akpp.wakatobi@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA TERMIN SATU PENELITIAN
PENGUATAN KAWASAN KONSERVASI MELALUI REHABILITASI TERUMBU
KARANG MENGGUNAKAN METODE *WEB SPIDER* UNTUK MENDUKUNG
EKOWISATA PULAU MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
NOMOR B.1117/AKKP.WKTB/RSDM.450/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat bertempat di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Desa Matahora Kabupaten Wakatobi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac

Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Nur Ikhsan, S.Pi., M.Si

Jabatan : Dosen Tetap Non PNS

Alamat : Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi

Dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan dana penelitian terapan institusi termin satu yang telah dilakukan penarikan dari Bank sejumlah Rp. 14.000.000 selanjutnya untuk dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan dana penelitian termin satu yang diserahkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan

- penelitian terapan serta melaporkan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, maka tanggung jawab pengelolaan dana penelitian tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 5. Berita acara serah terima dana penelitian termin satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini dibuat rangkap 2 (dua), dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Peneliti Akademi Komunitas
Kelautan dan Perikanan Wakatobi,



Nur Ikhsan

Wakatobi, 13 Juni 2024

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran
Akademi Komunitas Kelautan dan
Perikanan Wakatobi,




Khairudin Isman



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 241751303017130

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	241751303017130	29-05-2024	29-05-2024	27,997,865.00	IDR	1	29-05-2024	27,997,865	NON GAJI KONTRAKTUAL	00891T/626402/2024	27-05-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang. Penelitian Terapan Terpusat 2024 di KKP an AKKP WAKATOBİ sesuai Kontrak No 325/PPK.PUSDIK/PL.430/V/2024 tgl 13/5/2024, BAST No: B.811/AKKP.WKTB/RSDM.450/V/2024 Tgl 20/5/2024 , BAP No: 374/PPK.PUSDIK/PL.430/V/2024	Cek Akun	☐



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

KONTRAK PENELITIAN TERAPAN TERPUSAT TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 325/PPK.PUSDIK/PL.430/V/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Wawan Kuncoro, S.St.Pi.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.135/KPA/BRSDM/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang beralamat di Gedung Mina Bahari 2 Lt.5 Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac.** selaku Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Matahora, Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara 93795, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Kontrak Penelitian Terapan Terpusat Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Kontrak Penelitian.

Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Perikanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 719 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 213 Tahun 2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Penerima Dana Penelitian Terapan Terpusat Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. DIPA Satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2024 Nomor : DIPA-032.12.1.626402/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK KESATU** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberi tugas atas pelaksanaan anggaran Penelitian Terpusat Tahun 2024 dan tercapainya Keluaran Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tugas yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 719 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti;
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan, serta keluaran kegiatan Penelitian Terpusat Tahun 2024 dan

berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran anggaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;

- (5) Keluaran kegiatan Penelitian Terpusat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Laporan Penelitian secara lengkap sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 719 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Publikasi Ilmiah dengan minimal Jurnal Nasional Terakreditasi (Dibuktikan dengan Tangkapan Layar/Surat Keterangan telah submit dari Jurnal tersebut);
- (6) Daftar nama tim peneliti, judul penelitian, dan rincian nilai Kontrak Penelitian tercantum pada Lampiran Dokumen ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima anggaran untuk kegiatan Penelitian Terpusat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 39.996.950,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2024 Nomor:DIPA-032.12.1.626402/2024 tanggal 20 Maret 2024 akun 2376.ABW.001.051.A.521219;
- (2) Anggaran pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) **Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%** dari total nilai Kontrak Penelitian sebesar Rp 27.997.865,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dibayarkan setelah Kontrak Penelitian ini diandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - (b) **Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30%** dari total nilai Kontrak Penelitian sebesar Rp 11.999.085,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan keluaran berupa:
 - i. Laporan Penelitian (Laporan Akhir) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 719 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana didalamnya juga mencakup Rekapitulasi Penggunaan Keuangan yang telah dilaksanakan dan Dokumentasi Penelitian;
 - ii. Publikasi Ilmiah minimal Jurnal Nasional Terakreditasi, dapat dibuktikan dengan Tangkapan Layar/Surat Keterangan telah submit dari Jurnal tersebut;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan anggaran sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Proposal Penelitian yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah anggaran yang diberikan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan ke KAS Negara.

PASAL 3

- (1) Anggaran Penelitian Terpusat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan **secara langsung (LS)** melalui KPPN Jakarta VI, kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Negara Indonesia
 - Nomor Rekening : 1847338030
 - Nama Rekening : RPL 103 KS AKKP WAKATOBI UTK PENELITIAN
 - NPWP : 83.990.557.7-816.000
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas penggunaan anggaran selama kegiatan Penelitian berlangsung;
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi nama rekening, nomor rekening, nama Bank, NPWP, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Kontrak Penelitian;
- (2) Atas perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan dituangkan dalam *Addendum*/Perubahan Kontrak Penelitian.

PASAL 5

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Kontrak Penelitian ini dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - (a) Pemutusan Kontrak Penelitian atau Penghentian Pelaksanaan Penelitian;
 - (b) Penghentian Pembayaran; dan/atau
 - (c) Tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur sesuai kewenangan dan kebijakan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

PASAL 6

- (1) Apabila Ketua Peneliti dari **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya disebabkan karena beberapa alasan tertentu, maka Ketua Peneliti wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada calon Ketua Peneliti pengganti yang terdapat pada susunan keanggotaan Tim Peneliti;
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - (a) Disebabkan alasan sakit berat sehingga tidak mampu melaksanakan penelitian dan kewajibannya sebagai Ketua Peneliti;
 - (b) Terdapat keadaan diluar kendali/dugaan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang menyebabkan Ketua Peneliti berhalangan untuk melaksanakan penelitian;

- (3) Calon pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikehendaki dengan syarat minimal menduduki Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli atau setara dengan Penata Muda Tk. I/IIIb.

PASAL 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara.

PASAL 8

- (1) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian ini dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh anggaran Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Jakarta, 13 Mei 2024
PIHAK KEDUA

Wawan Kuncoro, S.St.Pi.
NIP 19771230 200801 1 016

**Khairudin Isman, S.St.Pi.,
M.Dev.Prac.**
NIP 19761204 200502 1 001

Mengetahui:
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.
NIP 19671004 199903 2 001

Lampiran Kontrak Penelitian

Nomor : 325/PPK.PUSDIK/PL.430/V/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

**DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN TERAPAN TERPUSAT TAHUN 2024
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI**

No	Judul	Skema Penelitian	Ketua Pengusul	Total Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kontrak 70% (Rp)	Nilai Kontrak 30% (Rp)
1	Penguatan Kawasan Konservasi melalui Rehabilitasi Terumbu Karang Menggunakan Metode <i>Web Spider</i> untuk Mendukung Ekowisata Pulau Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Dosen Pemula	Nur Ikhsan, S.Pi., M.Si.	20,000,000	14,000,000	6,000,000
2	Analisis Penerapan Media <i>Coral Tree</i> untuk Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang Jenis <i>Acropora cervicornis</i> di Perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Dosen Pemula	Muhammad Musrianton, S.Pd., M.Si.	19,996,950	13,997,865	5,999,085
Jumlah				39,996,950	27,997,865	11,999,085

PIHAK KESATU

Wawan Kuncoro, S.St.Pi.
NIP 19771230 200801 1 016

Jakarta, 13 Mei 2024

PIHAK KEDUA

Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac.
NIP 19761204 200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B.4562.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
b. bahwa untuk itu perlu menugaskan pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada butir kesatu.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 032.02.1.622098/2024, tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Kinerja TA 2023-2024 pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal KKP Republik Indonesia.

Biaya : Biaya dibebankan kepada Anggaran DIPA Inspektorat Jenderal KKP TA 2023

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal
2. Arsip

Jakarta, 12 Juni 2024

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III,



Wahjudi Poerwanto

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.4562.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No.	Nama Personil	Gol.	NIP	Jabatan/Peran	Waktu Pelaksanaan
1.	Wahjudi Poerwanto	IV C	19670116 199703 1 002	Penanggung Jawab	- s.d -
2.	Noor Adram Bachtiar	IV D	19620424 199002 1 002	Pengendali Mutu	25 Jun s.d 26 Jun 2024
3.	Erwyansyah	III D	19761109 200212 1 004	Pengendali Teknis	23 Jun s.d 26 Jun 2024
4.	Octa Agung Nugroho	III D	19821008 200502 1 001	Ketua	19 Jun s.d 26 Jun 2024
5.	Mohammad Ikhwan	III A	19890201 202012 1 003	Anggota	19 Jun s.d 26 Jun 2024
6.	Prita Isvandria Pradhiati	III A	19961122 202012 2 002	Anggota	19 Jun s.d 26 Jun 2024

Jakarta, 12 Juni 2024

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III,



Wahjudi Poerwanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

TEMUAN SEMENTARA DAN RENCANA AKSI ATAS AUDIT KINERJA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (AK KP) WAKATOBI
TA 2023 s.d 2024

A. Dasar Audit

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP;
3. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup Inspektorat Jenderal KKP;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Itjen KKP Tahun 2024 Nomor 032.02.1.622098/2024, tanggal 24 November 2023; dan
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.4562.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 perihal Melaksanakan Audit Kinerja TA 2023-2024 pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Tujuan Audit

Audit yang dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Menilai kinerja satuan kerja dan penggunaan sumber daya, apakah telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif serta memenuhi azas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan satker yang bersangkutan;
3. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja satker.

Handwritten signature/initials

C. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit kinerja mencakup:

1. Penelaahan dan pengujian terhadap keandalan sistem pengendalian intern guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa program/kegiatan Satker telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
2. Pengelolaan kegiatan/sub kegiatan Satker serta pemanfaatan hasil pelaksanaannya;
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional (APF) sebelumnya.

D. Batasan Audit

1. Masa yang diaudit : TA 2023 - 2024 (1 Maret 2023 s.d. 20 Juni 2024)
2. Waktu Pelaksanaan Audit : 19 s.d. 26 Juni 2024
3. Audit tidak mencakup seluruh kegiatan, melainkan dilakukan secara uji petik meliputi:
 - a. Tahun 2023 senilai Rp2.320.095.569,00, dapat dirinci kode/nama kegiatan/akun, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (2376.ABW) meliputi akun 521219 senilai Rp100.000.000,00;
 - 2) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (2376.QDD) meliputi akun 521211 senilai Rp44.600.000,00;
 - 3) Sarana Bidang Pendidikan (2376.RAA) akun 532111 senilai Rp11.600.000,00;
 - 4) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (2376.SAC) meliputi akun:
 - a) 521112 senilai Rp312.134.000,00;
 - b) 521211 senilai Rp68.000.000,00;
 - c) 521213 senilai Rp2.100.000,00;
 - d) 521219 senilai Rp96.000.000,00;
 - e) 521811 senilai Rp13.988.250,00;
 - f) 521832 senilai Rp15.000.000,00;
 - g) 522151 senilai Rp4.800.000,00.
 - 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal (2378.EBA) meliputi akun:
 - a) 511129 senilai Rp92.423.000,00;

Ka. Qa

- b) 512411 senilai Rp988.946.179,00;
 - c) 521111 senilai Rp156.463.650,00;
 - d) 521115 senilai Rp107.232.000,00;
 - e) 521213 senilai Rp8.160.000,00;
 - f) 521811 senilai Rp4.185.000,00;
 - g) 523111 senilai Rp273.499.000,00.
- 6) Layanan Manajemen Kinerja Internal (2378.EBD) meliputi akun 521811 senilai Rp20.964.490,00.
- b. Tahun 2024 total senilai Rp610.221.074,00, dapat dirinci kode/nama kegiatan/akun, sebagai berikut:
- 1) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (2376.QDD) meliputi akun 521211 senilai Rp5.700.000,00
 - 2) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (2376.SAC) meliputi akun:
 - a) 521211 senilai Rp12.500.000,00;
 - b) 521811 senilai Rp11.160.000,00;
 - c) 521832 senilai Rp15.000.000,00;
 - d) 522151 senilai Rp1.887.000,00;
 - e) 522191 senilai Rp118.916.400.
 - 3) Layanan Dukungan Manajemen Internal (2378.EBA) meliputi akun:
 - a) 511129 senilai Rp25.346.000,00;
 - b) 512411 senilai Rp401.915.544,00;
 - c) 521115 senilai Rp7.872.000,00.
 - 4) Layanan Manajemen Kinerja Internal (2378.EBD) akun 521811 senilai Rp9.924.130,00.
4. Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
5. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab Satker.

E. Informasi Auditi

1. Identitas Auditan

a. Nama Satker	AK KP Wakatobi
b. Kode Satker	032.12. 352595
c. Alamat	Jl. Soekarno-Hatta, Desa Matahora Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi, 93795
d. Kepala Satker / KPA	
1) Tahun 2023	Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
2) Tahun 2024	Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
e. PPK	
1) Tahun 2023	Alfi Kusuma Admaja, S.Pi., M.Si
2) Tahun 2024	Alfi Kusuma Admaja, S.Pi., M.Si
f. Penandatanganan SPM	La Ode Muhammad Norsa, S.Pi.,M.S.T.Pi
g. Bendahara Pengeluaran	Supriadin, S.Kom Muhammad Fattah Alfian, A.Md.,Lib
h. Bendahara Penerimaan	Harudin, S.P.,M.P
i. Pejabat Pengadaan	Sariamin Sahari, S.Pd.,M.Si
j. Kepala Subbagian Umum	Ahmad Yasin, S.Kom
k. Ketua	
1) Tim Kerja Tridharma Perguruan Tinggi	Sariamin Sahari, S.Pd.,M.Si
2) Tim Kerja Kerja Serapan Peserta Didik	Sariamin Sahari, S.Pd.,M.Si
3) Tim Kerja Wirausaha dan PNB	Dewi Utami, S.St.Pi.,M.Si
4) Tim Kerja Dukungan Manajerial	Ahmad Yasin, S.Kom
l. Jumlah Anggaran yang Dikelola	
TA 2023	Rp5.217.092.000,00

TA 2024	Rp7.212.329.000,00
m. Jumlah Anggaran yang Diaudit	
TA 2023	Rp2.320.095.569 (44,47% dari yang dikelola)
TA 2024 (Januari-20 Juni)	Rp610.221.074,00 (8,46% dari yang dikelola)

2. Indikator Keluaran Menurut Kegiatan

a. TA 2023

- 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, sebanyak 1 (satu) Rekomendasi (Kebijakan, Kajian);
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat;
- 3) Sarana Bidang Pendidikan, sebanyak 1 (satu) paket (unit, m2);
- 4) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, sebanyak 50 orang;
- 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal, sebanyak 2 (dua) Layanan (laporan, dokumen, rekomendasi, unit);
- 6) Layanan Manajemen Kinerja Internal, sebanyak 3 (tiga) Dokumen (layanan, laporan, rekomendasi).

b. TA 2024

- 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, sebanyak 1 (satu) Rekomendasi (Kebijakan, Kajian);
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat;
- 3) Sarana Bidang Pendidikan, sebanyak 1 (satu) paket (unit, m2);
- 4) Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, sebanyak 1 (satu) unit;
- 5) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, sebanyak 50 orang;
- 6) Layanan Dukungan Manajemen Internal, sebanyak 2 (dua) Layanan (laporan, dokumen, rekomendasi, unit);
- 7) Layanan Manajemen Kinerja Internal, sebanyak 3 (tiga) Dokumen (layanan, laporan, rekomendasi).

3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Penerimaan Negara

a. Realisasi Fisik

- 1) Realisasi fisik TA 2023 mencapai 98,99% dari target sebesar 100%;
- 2) Realisasi fisik TA 2024 (s.d 20 Juni 2024) sebesar 26,72%.

b. Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi anggaran TA 2023 senilai Rp5.164.593.887,00 atau 98,99% dari pagu anggaran Rp5.217.092.000,00;
- 2) Realisasi anggaran TA 2024 (s.d. 20 Juni) senilai Rp1.926.888.987,00 atau 26,72% dari pagu anggaran Rp7.212.329.000,00.

c. Penerimaan Pajak

- 1) Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp173.128.229,00;
- 2) Penerimaan Pajak s.d 20 Juni 2024 sebesar Rp48.490.843,00.

Seluruhnya telah disetor ke Kas Negara.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 1) Realisasi PNBP TA 2023 senilai Rp31.560.000,00 atau 201,31% dari target senilai Rp15.677.000,00, seluruhnya telah disetor ke Kas Negara.
- 2) Realisasi PNBP TA 2024 (s.d. 20 Juni 2024) senilai Rp350.000,00 atau 2.23% dari target senilai Rp15.677.000.

F. Data Tim Audit

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Wahjudi Poerwanto |
| 2. Pengendali Mutu | : Noor Adram Bachtiar |
| 3. Pengendali Teknis | : Erwyansyah |
| 4. Ketua Tim | : Octa Agung Nugroho |
| 5. Anggota Tim | : a. Mohammad Ikhwan
b. Deny Tri Prastyo |

G. Keberhasilan yang Telah Dicapai

Hasil yang telah dicapai oleh AK KP Wakatobi selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu:

1. Memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bau-Bau sebagai:
 - a. Peringkat 2 Satker Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang; dan

- b. Satker dengan Nilai IKPA 100 pada Triwulan I TA 2024.
2. Pegawai AK KP Wakatobi atas nama Heru Santoso mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta) dari Kementerian Hukum dan HAM atas karya ilmiahnya yang berjudul "Mortality Rate Ikan Hasil Tangkapan Untuk Pembesaran" "*Mortality Rate Of Fish Caught For Rearing*" yang diumumkan pada 27 November 2023 di Mataram.

H. Uraian Hasil Audit

1. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Tidak Sesuai dengan Ketentuan (2.01.02)

Kondisi:

AKKP Wakatobi telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebanyak 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tahun 2024 sebanyak 17 IKU yang dilakukan pengukuran kinerja per triwulan. Target Kinerja TA 2023 telah tercapai dengan skor Kinerja sebesar 102.38.

Berdasarkan audit diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengukuran dan pelaporan capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan perhitungan IKU tahun 2023 pada "*Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)*", yaitu:

- 1) Realisasi IKU yang disajikan dalam Laporan Kinerja AKKP Wakatobi Tahun 2023 sebesar 75%, namun dengan penjelasan sebanyak **29 dari 48 (dihitung sebesar 60,41%)** lulusan AKKP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan.
Dijelaskan lebih lanjut dalam manual IKU bahwa nilai persentase diperoleh dari perbandingan antara jumlah lulusan pendidikan vokasi Kelautan dan Perikanan (KP) yang bekerja di bidang Kelautan dan Perikanan dengan jumlah lulusan pendidikan vokasi KP pada Tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan atau Tahun sebelumnya. Dalam manual IKU Tahun 2023 **tidak dijelaskan** secara rinci perihal definisi lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Berdasarkan Surat Direktur AKKP Wakatobi kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor B.41/AKKP.WKTB/TU.210/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal penyampaian data dukung

capaian kinerja periode Triwulan IV 2023, khusus IKU 1 "*Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)*" diketahui bahwa terdapat lulusan AKKP Wakatobi yang **bekerja tidak pada bidang** kelautan dan perikanan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. Daftar Lulusan yang bekerja tidak pada bidang kelautan dan perikanan

No	NIT	Nama	Prodi	Nama Instansi/Perusahaan Tempat Bekerja	Alamat	Jabatan
1	22910004	Azlan	Ekowisata Bahari	Desa Tindoi Timur	Kab. Wakatobi	Staf
2	22810011	La Ode Akib Fasya M.	Konservasi	IDM (Indomaret) Betoambari 77	Kota Bau-Bau	Pelayan Resto
3	22910019	Rasni Anjani	Ekowisata Bahari	-	Wanci	Pemasar
4	22910022	Satriani	Ekowisata Bahari	Toko Souvenir (MP)	Kab. Muna	Produksi

b. Indikator Kinerja "*Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten (Orang)*" berpotensi tidak tercapai, yaitu:

- 1) Target IKU yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja AKKP Wakatobi Tahun 2024 sebesar 50 orang berdasarkan kapasitas asrama. Pada Tahun Ajaran 2023/2024 AKKP Wakatobi awalnya akan menerima 50 peserta didik baru, namun diketahui 9 peserta didik tidak melanjutkan ke tahapan daftar ulang.
- 2) Dijelaskan lebih lanjut dalam manual IKU bahwa perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di Akademi Komunitas KP Wakatobi dengan bukti dukung berupa Data Peserta didik *by name by address* di satuan pendidikan yang disahkan oleh Direktur AKKP Wakatobi.
- 3) Berdasarkan Surat Direktur AKKP Wakatobi kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor B.491/AKKP.WKTB/-RSDM.410/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, hal penyampaian data Penyampaian Data Usulan Drop Out (DO) Taruna, diketahui bahwa 9 peserta didik yang diusulkan DO tidak mengikuti pembelajaran tatap muka pada semua mata kuliah semester gasal yang berakibat nilai semester tidak tuntas/tidak lulus. Sampai dengan saat audit belum

terdapat respon balasan dari Pusat Pendidikan KP atas usulan DO tersebut.

- c. Terdapat bukti dukung yang tidak sesuai untuk pengukuran kinerja pada Manual IKU TA 2023, yaitu:
 - 1) Bukti dukung berupa **Nota Dinas Biro Keuangan** pada IKU *"Persentase rekomendasi hasil pengawasan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"*
 - 2) Bukti dukung berupa **Sub. Bagian Umum AK KP Wakatobi** pada IKU *"Nilai PM SAKIP Akademi Komunitas KP Wakatobi"*
- d. Data bukti dukung capaian kinerja pada semua IKU periode Tahun 2023 tidak diunggah pada aplikasi Kinerjaku.

Kriteria:

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada:
 - 1) Pasal 9 ayat (2) poin a, menyatakan bahwa *"Indikator Kinerja Utama disusun dengan ketentuan SMART: Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound;"*
 - 2) Pasal 19 ayat (3), menyatakan bahwa *"Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi Pengelolaan Kinerja."*
 - 3) Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa *"Pengelolaan Kinerja Kementerian didukung oleh sistem informasi berbasis elektronik"*
 - 4) Lampiran VIII pada BAB 3, menyatakan bahwa *"Akuntabilitas Kinerja terdiri dari:"* pada poin 1. *"Capaian Kinerja Organisasi, berisi:*
 - a) *Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan berjalan;*
 - b) *Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*

- c) *Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*
 - d) *Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada);*
 - e) *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;*
 - f) *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;*
 - g) *Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.*
- b. Manual IKU AKKP Wakatobi TA 2023 dan TA 2024.

Sebab:

Hal ini disebabkan ketidakcermatan Direktur AKKP Wakatobi selaku Penanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja terkait:

- a. Penyampaian data dukung capaian IKU Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan TA 2023;
- b. Penyampaian usulan Target IKU Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten TA 2024, tanpa mempertimbangkan adanya potensi peserta didik yang tidak melanjutkan perkuliahan;
- c. Penyusunan Manual IKU Wakatobi TA 2023;
- d. Penginputan bukti dukung capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku.

Akibat:

Hal ini mengakibatkan:

- a. Pengukuran dan pelaporan kinerja Tahun 2023 tidak handal;
- b. Capaian kinerja pada IKU Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten TA 2024 berpotensi tidak tercapai.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AKKP Wakatobi agar:

1. Menginstruksikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja untuk:
 - a. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penyampaian data dukung capaian kinerja;
 - b. Lebih cermat dalam menganalisis potensi risiko dalam usulan Target capaian kinerja;
 - c. Mengunggah data dukung capaian kinerja secara berkala pada aplikasi Kinerjaku.
2. Mengusulkan revisi Manual IKU ke Pusat Pendidikan KP.
3. Melakukan koordinasi secara tertulis kepada Pusat Pendidikan KP terkait proses rekrutmen Taruna Baru Diploma 1 untuk dikaji ulang dalam rangka pencapaian IKU unit kerja.

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

2. Kajian Penelitian Terapan Kelautan dan Perikanan yang telah Dilaksanakan belum dapat diketahui *output*, dan terjadi inefisiensi (3.03.05)

Kondisi:

AK KP Wakatobi memiliki alokasi anggaran Penelitian Terapan KP TA 2023 sebanyak 5 paket menggunakan akun belanja 521219 atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya, masing-masing senilai Rp20.000.000,00 atau total senilai Rp100.000.000,00, terealisasi seluruhnya 100%. Judul penelitian yang terdapat pada RKAKL 2023 sebagai berikut:

- a. Perbandingan Permodelan Emisi *Global Warming Potential* dari Sampah Darat dan Laut Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi;
- b. *Mortality Rate* Ikan Hasil Pancing yang akan di Besarkan di Keramba Jaring Apung (KJA);
- c. Rancangan Paket Minawisata Berbasis Konservasi di Wakatobi;

- d. Partisipasi Perempuan Di Desa Wisata Liya Togo, Wakatobi;
- e. Kajian Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Pelampung Budidaya Rumput Laut *Eucheuma Cottonii* yang ramah Lingkungan Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Menurut para anggota tim penelitian, seluruh penelitian terapan yang dilaksanakan di tahun 2023 hasilnya beberapa telah melalui tahap seminar nasional, prosiding hingga tahap penciptaan karya ilmiah kepada Kementerian Hukum dan HAM, seperti pada judul penelitian "Pemodelan Emisi Udara Indikator Perubahan Iklim dari Sampah Laut di Kawasan Taman Nasional Laut: Pantai Sombu, Wakatobi", "*Mortality Rate* Ikan Hasil Tangkapan untuk Pembesaran";
- b. Diketahui beberapa dosen anggota dari Tim Penelitian telah mutasi ke Satker lain di KKP, sehingga kegiatan pelaksanaan hingga pelaporan tidak dapat terkoordinir dengan baik. Contohnya pada kegiatan pelaporan penelitian, bahkan sampai dengan saat audit dilaksanakan Juni 2024, terdapat kajian penelitian yang belum diketahui outputnya atau yang masih dalam tahapan pelaporan atau belum tuntas diselesaikan hingga tahap publikasi antara lain judul penelitian "Kajian Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Pelampung Budidaya Rumput Laut *Eucheuma Cottonii* yang ramah Lingkungan Kabupaten Wakatobi".

Kriteria:

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, Bagian Kesembilan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi unit, serta evaluasi dan pelaporan.*";

- b. SOP Pelaporan Penelitian yang menyatakan bahwa "*Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menginformasikan jadwal penyerahan laporan hasil kegiatan penelitian kepada Peneliti/Tim Peneliti*".

Sebab:

Kondisi ini disebabkan ketidakcermatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) AK KP Wakatobi yang tidak cermat dalam mengoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian khususnya tahap pelaporan. **(0101)**

Akibat:

Akibatnya pelaksanaan kegiatan penelitian terapan kelautan dan perikanan tidak dapat diketahui output/hasilnya, atau tidak dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* Kelautan dan Perikanan karena tidak terpublikasi, sehingga terjadi inefisiensi anggaran minimal senilai Rp20.000.000,00.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AK KP Wakatobi agar:

- a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Unit P2M, atas ketidakcermatan dalam mengoordinir pelaporan hasil kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Tahun 2023; **(05)**
- b. Memerintahkan kepada Tim Kegiatan Penelitian untuk melanjutkan pelaporan kegiatan penelitian TA 2023 hingga dapat dipublikasikan kepada masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan dan tujuan organisasi dapat tercapai. **(06)**

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

E. Am

3. Terdapat Kelebihan Bayar Pertanggungjawaban Uang Makan Pegawai dan Kekurangan Pemotongan Tunjangan Kinerja yang Belum Disetorkan ke Kas Negara senilai Rp922.585,00 (1.01.09)

Kondisi:

Diketahui alokasi pagu anggaran Tunjangan Kinerja pada TA 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp994.200.000,00 dan senilai Rp952.774.000,00, dan terealisasi pada Tahun 2023 senilai Rp988.946.179,00 (99,47% dari pagu anggaran) dan Per Juni 2024 senilai Rp401.915.544,00 (42,18% dari pagu anggaran). Sedangkan pagu anggaran uang makan PNS TA 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp106.370.000,00 dan senilai Rp134.469.000,00, terealisasi pada Tahun 2023 senilai Rp98.781.000,00 (92,87% dari pagu anggaran) dan per Juni 2024 senilai Rp25.346.000,00 (18,85% dari pagu anggaran).

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Terdapat kelebihan dan kekurangpotongan tunjangan kinerja PNS akibat dari kesalahan perhitungan formulasi salah satu komponen pada presensi elektronik dengan selisih total kurang potong senilai Rp90.585,00, sebagaimana pada lampiran 1;
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan PNS akibat dari kesalahan perhitungan atas ketidaksesuaian jumlah kehadiran pegawai pada rekapitulasi kehadiran presensi elektronik dengan selisih lebih bayar senilai Rp832.000,00 sebagaimana pada lampiran 2;
- yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan KKP, antara lain pada BAB IV Pengurangan Tunjangan Kinerja, pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pegawai dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja karena: poin a. Disiplin presensi,*" poin b. s.d. poin e. dst. Pasal 19 ayat (2) "*Pegawai yang terlambat masuk kerja tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pegawai*

yang bersangkutan mengganti waktu keterlambatan dengan pulang lebih lambat sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan"

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Negara, Bab II Pemberian Uang Makan, pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan*", Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut: huruf a. tidak hadir kerja; b. sedang melaksanakan perjalanan dinas; c. sedang melaksanakan cuti;*" poin d s.d. e dst.

Sebab:

Kekurangcermatan Bendahara Pengeluaran dan Operator Penginput Aplikasi Gaji dan Tunjangan Kinerja saat melakukan penginputan jumlah hari kehadiran pegawai dan menit keterlambatan pegawai pada aplikasi terkait gaji dan tunjangan kinerja, serta tidak menggunakan aplikasi pembantu misalnya excel guna mencadangkan data perhitungan tunjangan kinerja per bulan sehingga jika terdapat kekeliruan mudah dalam menelusurinya. **(0303)**

Akibat:

Akibatnya terdapat kelebihan bayar uang makan pegawai senilai Rp832.000,00 dan kurang potongan tunjangan kinerja senilai Rp90.585,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AK KP Wakatobi agar:

- a. Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran dan Operator Penginput Aplikasi Gaji dan Tunjangan Kinerja supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penginputan jumlah hari kehadiran pegawai, dan menit keterlambatan pegawai pada aplikasi terkait gaji dan tunjangan kinerja; **(05)**
- b. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Pegawai terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar uang makan pegawai senilai

Rp832.000,00 dan kurang potongan tunjangan kinerja senilai Rp90.585,00 untuk disetorkan ke Kas Negara. (01)

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

4. Pemotongan dan Penyetoran Pajak pada Pertanggung-jawaban Belanja Tidak Sesuai Ketentuan (1.03.05)

Kondisi:

Berdasarkan aplikasi Monsakti pada menu Monitoring SPP/SPM/SP2D dapat terakumulasi penyetoran pajak (PPN, PPh pasal 21, 22, 23 dan pasal 4 ayat (2)) Satker AK KP Wakatobi Tahun 2023 dan 2024. Pada belanja barang dan modal Tahun 2023, telah terealisasi penyetoran pajak total senilai Rp173.128.229,00, dan di Tahun 2024 (s.d. 20 Juni 2024) total senilai Rp48.490.843,00.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Terdapat kelebihan penyetoran pajak PPN dan PPh (pasal 22, dan pasal 23) pada transaksi belanja TA 2023 sebanyak 24 Surat Perintah Membayar (SPM) dengan selisih lebih setor senilai total Rp2.872.531,00, dan TA 2024 sebanyak 2 (dua) SPM dengan selisih lebih setor senilai Rp299.549,00 sebagaimana dalam lampiran 3.;
- b. Terdapat kekurangan penyetoran Pajak PPh Pasal 23 pada transaksi belanja TA 2023 sebanyak 2 (dua) SPM Nomor 00024A dan 00025A tanggal 1 Maret 2023 masing-masing senilai Rp95.135,00 atau total senilai Rp190.270,00;
- c. Terdapat kesalahan akun penyetoran pajak PPh pasal 22, seharusnya menggunakan akun 421122, namun Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) menggunakan akun 421124. Hal ini terdapat pada 2 (dua) SPM Nomor 00164A dan 00165A tanggal 28 Agustus 2023.

Kriteria:

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pasal 227, Paragraf 2 Pengujian SPP dan Penerbitan SPM, Pasal 225 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK"*. ayat (2) menyatakan bahwa *"Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik meliputi huruf f kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;"*
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, Lampiran yang menyatakan bahwa *"Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, Bagan Akun Standar digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan, dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik;"*

Sebab:

Hal ini disebabkan ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) AK KP Wakatobi dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyeteroran pajak, serta verifikasi SPM (0303).

Akibat:

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penyeteroran pajak ke Kas Negara oleh Satker rentan dikomplain oleh Pihak Ketiga yang memiliki hak tagih atas suatu transaksi;
- b. Penyeteroran pajak yang kurang ke Kas Negara mengakibatkan penerimaan pajak yang berkurang senilai Rp190.270,00.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AK KP Wakatobi agar:

f dan

- a. Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran dan PPSPM untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak dan verifikasi SPM **(05)**;
- b. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran AK KP Wakatobi untuk menyetorkan kekurangpotongan pajak penghasilan ke Kas Negara sesuai dengan SPM Nomor 00024A dan 00025A tanggal 1 Maret 2023 masing-masing senilai Rp95.135,00 atau total senilai Rp190.270,00. **(01)**.

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

5. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp2.250.000,00 (1.01.09)

Kondisi:

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2023 dan Bulan Januari s.d. Februari Tahun 2024, diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada kegiatan Melaksanakan Pengantaran Dokumen Surat Perintah Membayar TA 2023 di KPPN Bau-Bau, tanggal 27 s.d. 30 November 2023 senilai Rp760.000,00 (Rp380.000,00 x 2 hari);
- b. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Mutu Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan pada 9 sd 15 November 2023 di Courtyard by Marriot Bandung Dago, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat, senilai Rp760.000,00 (UH Rp380.000,00 x 2 hari);
- c. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian *fullboard* pada kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 22 - 28 Oktober, senilai Rp180.000,00;
- d. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada kegiatan FGD Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan

E. Qam

dan Perikanan pada tanggal 1 sd 3 November 2023 di Onih Hotel Bogor, senilai Rp450.000,00 (Uang *Fullboard* Rp150.000,00 x 3 hari).

Rincian hasil uji petik dokumen pertanggungjawaban keuangan sebagaimana pada lampiran 4.

Kriteria:

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, pada:
 - 1) Pasal 1 ayat (24), menyatakan bahwa "*Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran*";
 - 2) Pasal 8, pada huruf f, menyatakan bahwa "*KPA memiliki tugas dan wewenang melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara*"; dan pada huruf h, yaitu menyatakan bahwa "*KPA mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran*";
 - 3) Pasal 12 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa "*PPK memiliki tugas dan wewenang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara*";
 - 4) Pasal 13, menyatakan bahwa "*PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara*";
 - 5) Pasal 15, menyatakan bahwa "*PPSPM memiliki tugas dan wewenang:*
 - a) huruf a, *menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;*
 - b) huruf b, *menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan*";
 - 6) Pasal 66 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa "*Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah melakukan meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA.*"

- 7) Pasal 65 ayat (1), menyatakan bahwa *"Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tahun 2022 tentang Standard Biaya Masukan TA 2023, pada:
- 1) Lampiran 1 tentang SBM TA 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi:
 - a) Poin 30.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b) Poin 33.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di luar kota/di dalam kota.
 - 2) Penjelasan butir 33.2. menyatakan bahwa *"Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor."*

Sebab:

Hal tersebut disebabkan ketidakcermatan PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran dalam menguji kebenaran atas perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran **(0304)**.

Akibat:

Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pegawai senilai Rp4.680.000,00.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA agar:

- a. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran atas perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran **(06)**;
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas kepada

K. Qam

pegawai senilai Rp4.680.000,00.dan selanjutnya disetor ke Kas Negara (01).

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

6. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 Tidak Dapat Tercapai (2.02.01)

Kondisi:

Berdasarkan data dari aplikasi Single Source Data (SSD) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 20 Juni 2024, Satker telah memperoleh PNBP dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dengan realisasi Rp350.000,00 atau hanya 2,23% dari total Target PNBP 2024 senilai Rp15.677.000.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Target PNBP 2024 tidak berubah dari tahun 2023, namun pencapaian PNBP di semester I 2024 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023 menurun/ lebih rendah;
- b. Capaian per Juni 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Target Semester I 2024. Berdasarkan dokumen DIPA Lampiran III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang seharusnya pada Juni 2024 terealisasi PNBP senilai Rp2.750.000,00.

Kriteria:

- a. Aplikasi SSD PNBP;
- b. Dokumen DIPA Lampiran III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

Sebab:

Berdasarkan klarifikasi dengan Ketua Tim Kerja Wirausaha dan PNBP terhadap pencapaian PNBP yang menurun di Tahun 2024, beliau berpendapat



bahwa hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kunjungan wisata bahari oleh Para Wisatawan dan sejalan dengan tidak ada lagi penerbangan tujuan Wakatobi per Februari 2024. Sehingga penerimaan PNBPN yang berasal dari penyewaan terhadap alat selam yang dimiliki oleh Satker menjadi tidak ada. (0103)

Akibat:

Potensi PNBPN Satker Tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya 2023, atau tidak tercapai sesuai dengan target di Tahun 2024.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Direktur AK KP Wakatobi agar:

1. Menginstruksikan kepada Ketua Tim Kerja Wirausaha dan PNBPN untuk membuat rencana aksi guna percepatan pencapaian realisasi PNBPN sehingga target Tahun 2024 dapat tercapai. (09)
2. Berkoordinasi secara tertulis dengan Pusat Pendidikan KP dalam rangka mendapatkan nilai Maksimum Penggunaan (MP) PNBPN yang digunakan untuk belanja barang. (11)

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

7. Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Melebihi Standar Biaya Masukan TA 2023 senilai Rp3.140.594,59 (1.01.09)

Kondisi:

Akademi Komunitas KP Wakatobi mengalokasikan anggaran seragam peserta didik bagi Pelaku Utama Perikanan TA 2023 senilai Rp143.500.000,00 dengan realisasi belanja senilai Rp143.500.000,00 (100%).

Pembelian seragam peserta didik melalui *e-catalog* kepada CV Safari Jaya sesuai Surat Pesanan Nomor B.2680/BRSDM-AKKP.WKTB/PL.430/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 senilai Rp143.500.000,00.

Berdasarkan audit diketahui bahwa item barang yang dipesan berupa Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) KP Taruna/i sebanyak 41 stel dengan harga satuan senilai Rp900.000,00/stel, namun sesuai Standar Biaya Masukan TA 2023 disebutkan bahwa batas maksimal harga pengadaan pakaian seragam Mahasiswa/Taruna wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp600.000,00/stel.

Kriteria:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, pada:

- a. Pasal 3 ayat (1), bahwa *“Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”*.
- b. Lampiran I Nomor 39 hal Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas.

Sebab:

Kondisi tersebut disebabkan ketidakcermatan PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Taruna/i, yaitu tidak mempedomani ketentuan SBM TA 2023 **(0302)**.

Akibat:

Akibatnya terdapat inefisiensi keuangan negara atas belanja pengadaan seragam peserta didik senilai **Rp3.140.594,59** (Selisih harga 41 seragam senilai Rp12.300.000,00 – PPN 11% dari nilai kontrak awal senilai Rp 3.656.756,76 – PPh pasal 22 tarif 1,5% dari nilai kontrak awal senilai Rp498.648,65 – biaya pengiriman senilai Rp5.004.000,00)

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP agar menginstruksikan secara tertulis Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi selaku KPA untuk:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan atas ketidakcermatannya dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Taruna/i (08);
- b. Memerintahkan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan inefisiensi keuangan negara atas pengadaan seragam peserta didik TA 2023 senilai **Rp3.140.594,59** untuk disetorkan ke kas negara (01).

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

8. Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp2.954.995,00 (1.01.03)

Kondisi

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan di AKKP Wakatobi TA 2023 total senilai Rp276.446.000,00 dengan realisasi senilai Rp274.139.000,00 yang seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Permanen senilai Rp59.999.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Wakatobi Sejahtera sesuai SPK Nomor B.2504/BRSDM-AKKP.WKTB/PL.430/XI/2023, tanggal 20 November 2023 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender sampai dengan 9 Desember 2023;
- b. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B dan Rektorat senilai Rp198.500.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Aisyah Dwi Putri sesuai SPK Nomor B.2464/BRSDM-AKKP.WKTB/ PL.430/XI/2023, tanggal 14 November 2023 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 25 hari kalender sampai dengan 8 Desember 2023.

Berdasarkan hasil audit diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Permanen oleh CV Wakatobi Sejahtera senilai Rp1.690.678,00 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Kekurangan Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Permanen

Pemeliharaan Pagar Permanen	Volume Pada RAB	Volume Realisasi	Satuan	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Selisih (Rp)
Pekerjaan Pengecatan						
Pengecatan Pondasi dan Tembok Pagar	595,81	540,95	m2	54,86	30.818,04	1.690.678,00
TOTAL						1.690.678,00

- b. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B dan Rektorat oleh CV Aisyah Dwi Putri senilai Rp1.264.317,00 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Kekurangan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B dan Rektorat

Pemeliharaan Gedung Administrasi A, B dan Rektorat	Volume Pada RAB	Volume Realisasi	Satuan	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Selisih (Rp)
Pekerjaan Acian						
Pek Acian Dak Plat Lantai	102,44	80,81	m2	21,63	58,452	1.264.317,00
TOTAL						1.264.317,00

Kriteria

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- 1) Pasal 7 ayat (1), menetapkan bahwa "*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya yaitu: a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara*";
- 2) Pasal 11 ayat (1) huruf d, menetapkan bahwa "*PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya yaitu k. mengendalikan Kontrak*"; dan

E. Qam

3) Pasal 57

- a) ayat (2) menetapkan bahwa *"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"*; dan
- b) ayat (3) menetapkan, *"PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima"*.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yaitu pada Lampiran I,

- 1) Poin 7.11 Pengendalian Kontrak, dinyatakan bahwa *"Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/ pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, diantaranya yaitu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak"*; dan
- 2) Poin 8.1. Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan butir c dan d, menyatakan bahwa *"Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan"*.

Sebab

PPK kurang cermat dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan (0501).

Akibat

Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan kepada CV Wakatobi Sejahtera senilai Rp1.690.678,00 dan CV Aisyah Dwi Putri senilai Rp1.264.317,00.

Rekomendasi

Sehubungan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP agar menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA agar:

- a. Menegur secara tertulis PPK Satker AKKP Wakatobi yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; **(08)** dan
- b. Menginstruksikan secara tertulis PPK Satker AKKP Wakatobi agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan kepada CV Wakatobi Sejahtera senilai **Rp1.690.678,00** dan CV Aisyah Dwi Putri senilai **Rp1.264.317,00** untuk disetor ke Kas Negara. **(01)**

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

9. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Tertib (2.02.07)

Kondisi:

Berdasarkan Laporan BMN AKKP Wakatobi diketahui bahwa terdapat aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp21.563.309.980,00.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 774/BRSDM.SUPM-BN/TU.420/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan Pihak Kesatu yaitu Kepala SUPM Bone dan Pihak Kedua yaitu Direktur AKKP Wakatobi, diketahui bahwa AKKP Wakatobi memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 12 NUP dengan nilai perolehan senilai Rp21.538.309.980,00.
- b. Terdapat BMN yang belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang, yaitu BMN hasil pengadaan TA 2015 meliputi Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2 unit dengan masing-masing seluas 61,11 m2 dan 73,96 m2 serta Jalan Komplek dan Taman di depan Gedung Rektorat yang belum diketahui luasannya.

Kriteria:

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44 menyatakan bahwa "*Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya*".
- b. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bab III:

- 1) Poin A. Prinsip Umum

Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari: d) hasil audit/pengawasan pelaksanaan pengelolaan BMN oleh APIP K/L atau BPKP.

- 2) Poin E. Penertiban atas Pelaksanaan Penatausahaan BMN

- a) Pada angka 1, *Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Penatausahaan BMN apabila ditemukan kondisi antara lain: m. penghapusan atas BMN yang dihentikan dari operasional belum dilaksanakan, p. BMN yang dicatat dalam Daftar dan/atau Laporan Barang Rusak Berat belum diusulkan Pemindahtanganan/ Penghapusan kepada Pengguna Barang/Pengelola Barang.*

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur AKKP Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) tidak intens dalam pengendalian pengelolaan dan penatausahaan BMN yang berada dalam penguasaannya

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan BMN AKKP Wakatobi menjadi tidak menggambarkan nilai Gedung dan bangunan secara wajar.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur AKKP Wakatobi selaku KPB agar menginstruksikan kepada petugas BMN untuk:

1. Melakukan inventarisasi BMN dengan bukti Berita Acara Inventarisasi BMN secara internal, dilengkapi dengan Surat Tugas Inventarisasi;

2. Berkoordinasi dengan KPKNL guna mengajukan permohonan penilaian terhadap BMN yang telah diinventarisasi;
3. Melakukan pencatatan BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang atas hasil pengadaan TA 2015.

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024

10. Pengelolaan Rumah Negara Tidak Sesuai Ketentuan (2.01.01)

Berdasarkan Laporan BMN AKKP Wakatobi TA 2023, diketahui bahwa AKKP Wakatobi memiliki 2 (dua) unit bangunan Gedung Pos Jaga permanen yang merupakan perolehan Tahun 2012 dan 2013.

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa:

- a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Gedung Pos Jaga yang dibangun pada tahun 2014 yang belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- b. Total sebanyak 3 (tiga) unit bangunan Gedung pos jaga permanen tersebut merupakan bangunan rumah tempat tinggal yang saat ini dihuni oleh pegawai dan difungsikan sebagai Rumah Negara, namun belum dilakukan pendaftaran, penetapan status dan perubahan klasifikasi menjadi Rumah Negara sesuai peruntukannya.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, menetapkan "*Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri*".
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Pasal 5 ayat (4) yaitu, "*Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara*

Handwritten signature

Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki tanggung jawab: melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya; dan melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa Rumah Negara”.

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,

1) Pasal 6 yaitu *“Pimpinan Instansi yang bersangkutan wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara yang ada dalam lingkup wewenangya kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui: b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara yang terletak di luar DKO Jakarta, Bogor, Depo, Tangerang dan Bekasi”.*

2) Pasal 7

a) ayat (1) yaitu, *“Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III;*

b) ayat (2) *Penetapan status rumah negara berdasarkan penetapan status golongan dilakukan oleh: a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II”.*

3) Pasal 8

a) ayat (1) yaitu, *“Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;*

b) ayat (2) *Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah: a. Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah jabatan dan b. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan II”.*

- 4) Pasal 9 yaitu *“Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut: a. Menduduki jabatan di lingkungan instansi yang*

F. Qam

bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan di lingkungan instansi tersebut.

- 5) Pasal 10 yaitu "Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut: a. Berstatus pegawai negeri; b. Mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk; dan c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.

Sebab:

Ketidakcermatan Direktur AKKP Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN yang menjadi kewenangannya **(0304)**.

Akibat:

- a. Administrasi pengelolaan BMN pada AKKP Wakatobi menjadi kurang tertib.
- b. Negara belum memperoleh PNPB atas pemanfaatan aset gedung bangunan sebagai rumah negara sesuai ketentuan.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur AKKP Wakatobi agar:

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk:
 - 1) Dilakukan penilaian dan klasifikasi 3 (tiga) unit gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara; **(11)** dan
 - 2) Mengkonsultasikan besaran biaya sewa rumah negara tersebut **(11)**.
- b. Mengajukan kepada Sekretaris BPPSDMKP setelah terbit hasil penilaian dan klasifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk:
 - 1) Penetapan status 3 (tiga) unit Gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara; **(11)**
 - 2) Permohonan izin penghunian Rumah Negara kepada Kepala BPPSDMKP **(11)**.

Tanggapan:

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Rencana Aksi:

Minggu ke-4 bulan Juli 2024



Demikian temuan sementara dan kesanggupan tindak lanjut hasil pengawasan ini disepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi.

Wakatobi, 24 Juni 2024

Pihak yang Menyepakati

Direktur

AK KP Wakatobi



Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac
NIP. 197612042005021001

Tim Audit

1. Erwyansyah (PT)

2. Octa Agung Nugroho (KT)

3. Mohammad Ikhwan (AT)

4. Deny Tri Prastyo (AT)

Lampiran 1.

Lampiran Rekapitulasi Selisih Tunjangan Kinerja Lebih dan Kurang Potong TA
2023 dan 2024 pada AK KP Wakatobi

No	Nama PNS	TA 2023	TA 2024	Jumlah Selisih
1	Khairudin Isman	(806)	-	(806)
2	Dewi Utami	(3,353)	-	(3,353)
3	La Ode Muh Norsa	280	-	280
4	Sariamin Sahari	285	862	1,147
5	Alfi Kusuma Admaja	31,722	(207)	31,515
6	La Ode Mansyur	36,764	-	36,764
7	Kezia Gloria Runtu	(1,841)	55	(1,786)
8	Normayasari	-	(8,918)	(8,918)
9	Ahmad Yasin	35,742	-	35,742
10	Moh. Fattah Alfian	-	-	-
	Total	98,793	(8,208)	90,585

Ket:	Minus	Lebih Potong	
	Plus	Kurang Potong	
	TA 2023	Januari s.d. Desember	
	TA 2024	Januari s.d. Mei	

Isman

Lampiran 2.

Lampiran Lebih Kurang Bayar Uang Makan PNS AK KP Wakatobi TA 2023 s.d. Mei 2024

Bulan	Jumlah Hari Lebih/Kurang Bayar	Jumlah (Rp)
April 2023	Ahmad Yasin Lebih 2 HARI	74.000
	Kezia lebih 2 hari	74.000
Juni 2023	Kezia Gloria lebih 2 hari	74.000
	Mohammad Fattah Allian lebih 1 hari	35.000
Agustus 2023	La Ode Muhammad Norsa lebih 7 hari	185.000
	La Ode Mansyur lebih 3 hari	123.000
September 2023	Sariamin Sahari lebih 1 hari	41.000
	Kezia Gloria lebih 1 hari	37.000
Desember 2023	Kezia Gloria lebih 1 hari	37.000
	Khairudin Isman lebih 5 hari	185.000
Januari 2024	Normayasari lebih 2 hari	74.000
	Sariamin Sahari lebih 1 hari	41.000
Mei 2024	Kezia Gloria kurang 4 hari	- 148.000
	Total	832.000

g. om

Lampiran 3. Kelebihan dan Kekurang setor Pajak PPN PPh AK KP Wakatobi Tahun 2023 dan 2024

No.	Nomor dan Tanggal		Nilai SPM			Nilai Seharusnya			Selisih		Jumlah	
	TA 2023		PPH	PPN		PPH	PPN		PPH	PPN	PPN + PPh	
	Kelebihan setor Pajak											
1	'00035A	24-MAR-23	92,905	681,306		84,459	619,369	8,446	61,937		70,382	
2	'00036A	24-MAR-23	92,905	681,306		84,459	619,369	8,446	61,937		70,382	
3	'00038A	28-MAR-23	297,297	2,180,180		270,270	1,981,982	27,027	198,198		225,225	
4	'00039A	28-MAR-23	297,297	2,180,180		270,270	1,981,982	27,027	198,198		225,225	
5	'00040A	28-MAR-23	297,297	2,180,180		270,270	1,981,982	27,027	198,198		225,225	
6	'00041A	28-MAR-23	297,297	2,180,180		270,270	1,981,982	27,027	198,198		225,225	
7	'00042A	28-MAR-23	297,297	2,180,180		270,270	1,981,982	27,027	198,198		225,225	
8	'00043A	29-MAR-23	35,676	261,622		32,432	237,838	3,244	23,784		27,028	
9	'00044A	29-MAR-23	267,568	1,962,162		243,243	1,783,784	24,325	178,378		202,703	
10	'00074A	17-MAY-23	112,973	828,468		102,703	753,153	10,270	75,315		85,585	
11	'00164A	28-AUG-23	150,135	1,100,991		136,486	1,000,901	13,649	100,090		113,739	
12	'00165A	28-AUG-23	222,973	1,635,135		202,703	1,486,486	20,270	148,649		168,919	
13	'00174A	19-SEP-23	92,905	681,306		84,459	619,369	8,446	61,937		70,382	
14	'00175A	19-SEP-23	92,905	681,306		84,459	619,369	8,446	61,937		70,382	
15	'00203A	19-OCT-23	148,649	1,090,090		135,135	990,991	13,514	99,099		112,613	
16	'00208A	30-OCT-23	44,595	327,027		40,541	297,297	4,054	29,730		33,784	
17	'00213A	09-NOV-23	197,703	1,449,820		179,730	1,318,018	17,973	131,802		149,775	
18	'00214A	13-NOV-23	202,162	1,482,523		183,784	1,347,748	18,378	134,775		153,153	
19	'00215A	13-NOV-23	222,973	1,635,135		202,703	1,486,486	20,270	148,649		168,919	
20	'00239A	22-NOV-23	127,838	937,477		116,216	852,252	11,622	85,225		96,847	
21	'00276A	14-DEC-23	151,622	1,111,892		137,838	1,010,811	13,784	101,081		114,865	
22	'00277A	15-DEC-23	48,772	357,659		44,338	325,144	4,434	32,515		36,949	
											2,872,531	
	Kekurangan setor pajak											
1	'00024A	01-MAR-23	864,865	-		960,000	-	(95,135)	-		(95,135)	
2	'00025A	01-MAR-23	864,865	-		960,000	-	(95,135)	-		(95,135)	
											(190,270)	
	TA 2024											
	Kelebihan setor Pajak											
	'00179A	03-JUN-24	112,973	828,468		77,027	564,865	35,946	263,603		299,549	

Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Uji Petik Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

No	Bulan	Uraian Belanja	Pegawai	No. SPM	Tgl. SPM	Permasalahan	Keuangan (Rp)
1	Desember 2023	Perjalanan Dinas Melaksanakan Pengantaran Dokumen Surat Perintah Membayar TA 2023 di KPPN Bau-Bau	La Ode Muhammad Norsa	00274A	14/12/2023	ST dan Laporan Perdin tanggal 27 sd 30 November, UH dibayarkan sejak tanggal 25 sd 30 November.	Rp 760.000,00
2	Desember 2023	Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Mutu Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan pada 9 sd 15 November 2023 di Courtyard by Marriott Bandung Dago, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat	Indah Alsitia	00253A	04/12/2023	- Kegiatan Fullboard pada tanggal 10 sd 11 (berdasarkan Undangan); - Tanggal 12 sd 13 dibayarkan UH Jawa Barat. pelaksana perdin dalam perjalanan ke pusat pendidikan dalam rangka koordinasi terkait mutasi pegawai ybs.	Rp 760.000,00
3	Nov-23	Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 22 - 28 Oktober	La Ode Mansyur	00235A	21/11/2023	Selisin perhitungan kelebihan uang fullboard senilai Rp180.000,00 (Rp720.000 - 540.000)	Rp 180.000,00

E. Don

No	Bulan	Uraian Belanja	Pegawai	No. SPM	Tgl. SPM	Permasalahan	Keuangan (Rp)
4	Nov-23	Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan FGD Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 sd 3 November 2023 di Onih Hotel Bogor	Khairudin Isman	00232A	21/11/2023	Keterangan dalam undangan bahwa uang saku peserta fullboard (1-3 Nov) diberikan dari panitia/penyelenggara, namun dibayarkan lagi oleh satker	450.000

Isman



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 15 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Berkas
Hal : **Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024**
pada Akademi Komunitas KP Wakatobi

Yth. Kepala BPPSDMKP
di Jakarta

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan Audit Kinerja TA 2023 – 2024 pada Satuan Kerja (Satker) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) Wakatobi, pada tanggal 19 s.d. 26 Juni 2024. Audit bertujuan untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; menilai kinerja Satker dan penggunaan sumber daya, apakah telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memenuhi asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan Satker; dan memberikan rekomendasi terhadap kelemahan/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja Satker.

Berdasarkan audit tersebut, disampaikan hasil yang telah dicapai, yaitu memperoleh penghargaan dari KPPN Tipe A2 Bau-Bau sebagai Peringkat 2 Satker Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang, dan Satker dengan Nilai IKPA 100 pada Triwulan I TA 2024, serta terdapat pegawai AKKP Wakatobi yang memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta) dari Kementerian Hukum dan HAM atas karya ilmiahnya.

Namun demikian, berdasarkan audit lebih lanjut, Inspektorat Jenderal KKP menemukan adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian terhadap ketentuan, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengukuran dan pelaporan kinerja tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pengukuran dan pelaporan kinerja TA 2023 tidak andal, serta indikator kinerja *Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan AKKP Wakatobi yang Kompeten* TA 2024 berpotensi tidak tercapai;
2. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan, uang harian perjalanan dinas, uang harian *fullboard*, kekurangan pemotongan tunjangan kinerja, kekurangan potongan pajak belanja barang, serta kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan, total senilai Rp6.217.850,00;
3. Pengelolaan BMN tidak tertib, sehingga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, yaitu:
 - a. Terdapat BMN yang tercatat dalam laporan tidak tepat penggolongan, dan luasannya;
 - b. Terdapat BMN yang belum tercatat dalam Laporan BMN;
 - c. Tiga unit bangunan yang dihuni oleh Pegawai menjadi Rumah Negara, belum ditetapkan statusnya.

Sehubungan hasil audit tersebut, kami merekomendasikan kepada Saudara untuk menginstruksikan Direktur AKKP Wakatobi agar:

1. Berkoordinasi secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Pusat Pendidikan KP perihal revisi manual IKU,
 - b. KPKNL setempat guna penertiban pencatatan BMN, khususnya penilaian terhadap BMN yang telah diinventarisasi;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wakatobi terkait penilaian dan besaran sewa Rumah Negara;
 - d. Sekretaris BPPSDMKP guna penetapan status Rumah Negara, izin penghunian Rumah Negara.
2. Perbaiki terkait prosedur pelaporan kinerja, kajian penelitian yang belum terdapat outputnya, pertanggungjawaban keuangan dan belanja (lebih bayar, kurang potong pajak, kurang volume pekerjaan);
3. Menyetorkan atas kelebihan bayar senilai Rp6.217.850,00 ke Kas Negara.

Uraian lengkap temuan dan rekomendasi disampaikan dalam laporan yang tidak terpisahkan dari surat ini (terlampir). Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dimaksud, diharapkan sudah diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Anggota IV BPK RI
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal
4. Kepala Biro Keuangan
5. Sekretaris BPPSDMKP
6. Direktur AKKP Wakatobi

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

**AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI
TA 2023-2024**

**Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024
Tanggal : 15 Juli 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Audit.....	1
B. Tujuan Audit	1
C. Ruang Lingkup Audit	1
D. Batasan Audit	2
E. Informasi Auditi.....	3
F. Tim Audit	6
BAB II URAIAN HASIL AUDIT	7
A. Hasil yang Telah Dicapai.....	7
B. Temuan Hasil Audit	7
C. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Sebelumnya.....	30
Lampiran Surat Dinas	31

TABEL

Tabel Daftar Lulusan yang Bekerja Tidak Pada Bidang Kelautan dan Perikanan	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Selisih Tunjangan Kinerja Lebih dan Kurang Potong TA 2023 dan 2024 pada AKKP Wakatobi	31
Lampiran 2. Lebih Kurang Bayar Uang Makan PNS AKKP Wakatobi TA 2023 s.d. Mei 2024.....	32
Lampiran 3. Kelebihan dan Kekurangan Setor Pajak PPN PPh AKKP Wakatobi Tahun 2023 dan 2024	33
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Uji Petik Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	34

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Audit

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal KKP Nomor SP DIPA-032.02.1.622098/2024, tanggal 24 November 2023;
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.4562.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024, tugas Melaksanakan Audit Kinerja TA 2023-2024 pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

B. Tujuan Audit

Audit yang dilakukan bersifat audit kinerja dengan tujuan untuk:

1. Mendeteksi adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern.
2. Menilai kinerja Satuan Kerja (satker) dan penggunaan sumber daya, apakah telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif serta memenuhi asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan Satker.
4. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja Satker.

C. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit kinerja mencakup:

1. Penelaahan dan pengujian terhadap kehandalan sistem pengendalian intern guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa program/kegiatan Satker telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Pengelolaan kegiatan/subkegiatan Satker serta pemanfaatan hasil pelaksanaannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional (APF) sebelumnya.

D. Batasan Audit

1. Masa yang diaudit : TA 2023 - 2024
(1 Maret 2023 s.d. 20 Juni 2024)
2. Waktu Pelaksanaan Audit : 19 s.d. 26 Juni 2024
3. Audit tidak mencakup seluruh kegiatan/subkegiatan, melainkan dilakukan secara uji petik, meliputi:
 - a. Tahun 2023 senilai Rp2.320.095.569,00, dapat dirinci kode/nama kegiatan/akun, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (2376.ABW) meliputi akun 521219 senilai Rp100.000.000,00;
 - 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (2376.QDD) meliputi akun 521211 senilai Rp44.600.000,00;
 - 3) Sarana Bidang Pendidikan (2376.RAA) akun 532111 senilai Rp11.600.000,00;
 - 4) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (2376.SAC) meliputi akun:
 - a) 521112 senilai Rp312.134.000,00;
 - b) 521211 senilai Rp68.000.000,00;
 - c) 521213 senilai Rp2.100.000,00;
 - d) 521219 senilai Rp96.000.000,00;
 - e) 521811 senilai Rp13.988.250,00;
 - f) 521832 senilai Rp15.000.000,00;
 - g) 522151 senilai Rp4.800.000,00.
 - 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal (2378.EBA) meliputi akun:
 - a) 511129 senilai Rp92.423.000,00;
 - b) 512411 senilai Rp988.946.179,00;
 - c) 521111 senilai Rp156.463.650,00;
 - d) 521115 senilai Rp107.232.000,00;
 - e) 521213 senilai Rp8.160.000,00;
 - f) 521811 senilai Rp4.185.000,00;

- g) 523111 senilai Rp273.499.000,00.
- 6) Layanan Manajemen Kinerja Internal (2378.EBD) meliputi akun 521811 senilai Rp20.964.490,00.
- b. Tahun 2024 total senilai Rp610.221.074,00, dapat dirinci kode/nama kegiatan/akun, sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (2376.QDD) meliputi akun 521211 senilai Rp5.700.000,00
 - 2) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (2376.SAC) meliputi akun:
 - a) 521211 senilai Rp12.500.000,00;
 - b) 521811 senilai Rp11.160.000,00;
 - c) 521832 senilai Rp15,000,000,00;
 - d) 522151 senilai Rp1.887.000,00;
 - e) 522191 senilai Rp118.916.400.
 - 3) Layanan Dukungan Manajemen Internal (2378.EBA) meliputi akun:
 - a) 511129 senilai Rp25.346.000,00;
 - b) 512411 senilai Rp401.915.544,00;
 - c) 521115 senilai Rp7.872.000,00.
 - 4) Layanan Manajemen Kinerja Internal (2378.EBD) akun 521811 senilai Rp9.924.130,00.
- 4. Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- 5. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab Satker.

E. Informasi Auditi

1. Identitas Auditi

- a. Nama Satker : AKKP Wakatobi
- b. Kode Satker : 032.12.352595
- c. Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Desa Matahora
Kec.Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi,
93795
- d. Kepala Satker / KPA : Khairudin Isman, S.St.Pi., M.Dev.Prac

- e. PPK : Alfi Kusuma Admaja, S.Pi., M.Si.
- f. Penandatanganan SPM : La Ode Muhammad Norsa, S.Pi., M.S.T.Pi.
- g. Bendahara Pengeluaran : 1) Supriadin, S.Kom.
2) Muhammad Fattah Alfian, A.Md.,Lib .
- h. Bendahara Penerimaan : Harudin, S.P., M.P.
- i. Pejabat Pengadaan : Sariamin Sahari, S.Pd., M.Si.
- j. Kepala Subbagian Umum : Ahmad Yasin, S.Kom.
- k. Ketua
 - 1) Tim Kerja Tridharma : Sariamin Sahari, S.Pd., M.Si.
Perguruan Tinggi
 - 2) Tim Kerja Kerja : Sariamin Sahari, S.Pd., M.Si.
Serapan Peserta
Didik
 - 3) Tim Kerja Wirausaha : Dewi Utami, S.St.Pi., M.Si.
dan PNBP
 - 4) Tim Kerja Dukungan : Ahmad Yasin, S.Kom.
Manajerial
- l. Anggaran yang Dikelola
 - 1) TA 2023 : Rp5.217.092.000,00
 - 2) TA 2024 : Rp7.212.329.000,00
- m. Anggaran yang Diaudit
 - 1) TA 2023 : Rp2.320.095.569 (44,47% dari yang
dikelola Rp5.217.092.000,00)
 - 2) TA 2024 (Januari s.d. : Rp610.221.074,00 (8,46% dari yang
20 Juni) Dikelola Rp7.212.329.000,00)

2. Indikator Keluaran Menurut Kegiatan

- a. TA 2023
 - 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, sebanyak 1 (satu) Rekomendasi (Kebijakan, Kajian);
 - 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat;
 - 3) Sarana Bidang Pendidikan, sebanyak 1 (satu) paket (unit, m²);
 - 4) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, sebanyak 50 orang;

- 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal, sebanyak 2 (dua) Layanan (laporan, dokumen, rekomendasi, unit);
- 6) Layanan Manajemen Kinerja Internal, sebanyak 3 (tiga) Dokumen (layanan, laporan, rekomendasi).

b. TA 2024

- 1) Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, sebanyak 1 (satu) Rekomendasi (Kebijakan, Kajian);
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat;
- 3) Sarana Bidang Pendidikan, sebanyak 1 (satu) paket (unit, m²);
- 4) Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, sebanyak 1 (satu) unit;
- 5) Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, sebanyak 50 orang;
- 6) Layanan Dukungan Manajemen Internal, sebanyak 2 (dua) Layanan (laporan, dokumen, rekomendasi, unit);
- 7) Layanan Manajemen Kinerja Internal, sebanyak 3 (tiga) Dokumen (layanan, laporan, rekomendasi).

3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Penerimaan Negara

a. Realisasi Fisik

- 1) Realisasi fisik TA 2023 mencapai 100%;
- 2) Realisasi fisik TA 2024 (s.d 20 Juni 2024) sebesar 26,72%.

b. Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi anggaran TA 2023 senilai Rp5.164.593.887,00 atau 98,99% dari pagu Rp5.217.092.000,00;
- 2) Realisasi anggaran TA 2024 (s.d. 20 Juni) senilai Rp1.926.888.987,00 atau 26,72% dari pagu Rp7.212.329.000,00.

c. Penerimaan Pajak

- 1) Penerimaan pajak TA 2023 sebesar Rp173.128.229,00;
- 2) Penerimaan pajak TA 2024 (s.d 20 Juni) sebesar Rp48.490.843,00. seluruhnya telah disetor ke Kas Negara.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 1) Realisasi PNBP TA 2023 senilai Rp31.560.000,00 atau 201,31% dari target senilai Rp15.677.000,00;

2) Realisasi PNBP TA 2024 (s.d. 20 Juni 2024) senilai Rp350.000,00
atau 2,23% dari target senilai Rp15.677.000,00,
seluruhnya telah disetor ke Kas Negara

F. Tim Audit

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Wahjudi Poerwanto |
| 2. Pengendali Mutu | : | Noor Adram Bachtiar |
| 3. Pengendali Teknis | : | Erwyansyah |
| 4. Ketua Tim | : | Octa Agung Nugroho |
| 5. Anggota Tim | : | a. Mohammad Ikhwan
b. Deny Tri Prastyo |

BAB II

URAIAN HASIL AUDIT

A. Hasil yang Telah Dicapai

Hasil yang telah dicapai oleh AKKP Wakatobi selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu:

1. Memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bau-Bau sebagai:
 - a. Peringkat 2 Satker Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang;
 - b. Satker dengan Nilai IKPA 100 pada triwulan I TA 2024.
2. Pegawai AKKP Wakatobi atas nama Heru Santoso mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta) dari Kementerian Hukum dan HAM atas karya ilmiahnya yang berjudul "*Mortality Rate Ikan Hasil Tangkapan Untuk Pembesaran (Mortality Rate Of Fish Caught For Rearing)*" yang diumumkan pada 27 November 2023 di Mataram.

B. Temuan Hasil Audit

1. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Tidak Sesuai dengan Ketentuan (2.01.02)

Kondisi

AKKP Wakatobi telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebanyak 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tahun 2024 sebanyak 17 IKU yang dilakukan pengukuran kinerja per triwulan.

Target Kinerja TA 2023 telah tercapai dengan skor kinerja sebesar 102,38. Berdasarkan audit diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengukuran dan pelaporan capaian kinerja, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan perhitungan IKU tahun 2023 pada "*Persentase Iulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)*", yaitu:
 - 1) Realisasi IKU yang disajikan dalam Laporan Kinerja AKKP Wakatobi Tahun 2023 sebesar 75%, namun dengan penjelasan

sebanyak **29** dari **48** (dihitung sebesar **60,41%**) lulusan AKKP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam manual IKU bahwa nilai persentase diperoleh dari perbandingan antara jumlah lulusan pendidikan vokasi Kelautan dan Perikanan (KP) yang bekerja di bidang Kelautan dan Perikanan dengan jumlah lulusan pendidikan vokasi KP pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan atau tahun sebelumnya.

Dalam manual IKU tahun 2023 **tidak dijelaskan** secara rinci perihal definisi lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan;

- 2) Berdasarkan Surat Direktur AKKP Wakatobi kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor B.41/AKKP.WKTB/TU.210/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal Penyampaian Data Dukung Capaian Kinerja periode Triwulan IV 2023, khusus IKU 1 *“Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)”* diketahui bahwa terdapat lulusan AKKP Wakatobi yang **bekerja tidak pada bidang** kelautan dan perikanan, sebagaimana rincian pada Tabel berikut:

Tabel. Daftar Lulusan yang Bekerja Tidak Pada Bidang Kelautan dan Perikanan

No	NIT	Nama	Prodi	Nama Instansi/Perusahaan Tempat Bekerja	Jabatan
1	22910004	Azlan	Ekowisata Bahari	Desa Tindoi Timur	Staf
2	22810011	La Ode Akib Fasya M.	Konservasi	IDM (Indomaret) Betoambari 77	Pelayan Resto
3	22910019	Rasni Anjani	Ekowisata Bahari	-	Pemasar
4	22910022	Satriani	Ekowisata Bahari	Toko Souvenir (MP)	Produksi

- b. Indikator Kinerja *“Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten (Orang)”* berpotensi tidak tercapai, yaitu:

- 1) Target IKU yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja AKKP Wakatobi Tahun 2024 sebesar 50 orang berdasarkan kapasitas asrama. Pada Tahun Ajaran 2023/2024, AKKP Wakatobi awalnya akan

menerima 50 peserta didik baru, namun berdasarkan klarifikasi diketahui 9 (sembilan) peserta didik tidak melanjutkan ke tahapan daftar ulang.

- 2) Dijelaskan lebih lanjut dalam manual IKU bahwa perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di AKKP Wakatobi dengan bukti dukung berupa Data Peserta didik *by name by address* di satuan pendidikan yang disahkan oleh Direktur AKKP Wakatobi.
 - 3) Berdasarkan Surat Direktur AKKP Wakatobi kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor B.491/AKKP.WKTB/-RSDM.410/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, hal Penyampaian Data Usulan *Drop Out* (DO) Taruna, diketahui bahwa 9 (sembilan) peserta didik yang diusulkan DO tidak mengikuti pembelajaran tatap muka pada semua mata kuliah semester gasal yang berakibat nilai semester tidak tuntas/tidak lulus. Sampai dengan saat audit belum terdapat respon balasan dari Pusat Pendidikan KP atas usulan DO tersebut.
- c. Terdapat bukti dukung yang tidak sesuai untuk pengukuran kinerja pada Manual IKU TA 2023, yaitu tertulis:
- 1) Bukti dukung berupa **Nota Dinas Biro Keuangan** pada IKU *“Persentase rekomendasi hasil pengawasan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”*.
 - 2) Bukti dukung berupa **Sub. Bagian Umum AKKP Wakatobi** pada IKU *“Nilai PM SAKIP Akademi Komunitas KP Wakatobi”*
- d. Data bukti dukung capaian kinerja pada semua IKU periode tahun 2023 tidak diunggah pada aplikasi Kinerjaku.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada:

- 1) Pasal 9 ayat (2) poin a, menyatakan bahwa *“Indikator Kinerja Utama disusun dengan ketentuan SMART: Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound;”*
- 2) Pasal 19 ayat (3), menyatakan bahwa *“Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi Pengelolaan Kinerja.”*
- 3) Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa *“Pengelolaan Kinerja Kementerian didukung oleh sistem informasi berbasis elektronik”*
- 4) Lampiran VIII pada BAB 3, menyatakan bahwa *“Akuntabilitas Kinerja terdiri dari:” pada poin 1. “Capaian Kinerja Organisasi, berisi:*
 - a) *Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan berjalan;*
 - b) *Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*
 - c) *Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*
 - d) *Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada);*
 - e) *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;*
 - f) *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;*
 - g) *Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.*

b. Manual IKU AKKP Wakatobi TA 2023 dan TA 2024.

Sebab

Kondisi ini disebabkan Direktur AKKP Wakatobi selaku Penanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja tidak cermat terkait: **(0303)**

- a. Penyampaian data dukung capaian IKU Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan TA 2023;

- b. Penyampaian usulan target IKU Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan AKKP Wakatobi yang kompeten TA 2024, tanpa mempertimbangkan adanya potensi peserta didik yang tidak melanjutkan perkuliahan;
- c. Penyusunan Manual IKU Wakatobi TA 2023;
- d. Penginputan bukti dukung capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku.

Akibat

Akibatnya:

- a. Pengukuran dan pelaporan kinerja tahun 2023 tidak andal;
- b. Capaian kinerja pada IKU *Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten TA 2024* berpotensi tidak tercapai.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi agar: **(06)**

- a. Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penyampaian data dukung capaian kinerja;
 - 2) Lebih cermat dalam menganalisis potensi risiko dalam usulan target kinerja;
 - 3) Mengunggah data dukung capaian kinerja secara berkala pada aplikasi Kinerjaku.
- b. Mengusulkan revisi Manual IKU ke Pusat Pendidikan KP.

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

2. Kajian Penelitian Terapan Belum Dapat Diketahui Outputnya, dan Terjadi Inefisiensi (3.03.05)

Kondisi

Satker AKKP Wakatobi memiliki alokasi anggaran Penelitian Terapan KP TA 2023 sebanyak 5 paket masing-masing senilai Rp20.000.000,00 atau

total senilai Rp100.000.000,00, Judul penelitian yang terdapat pada RKA-K/L adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan Permodelan Emisi *Global Warming Potential* dari Sampah Darat dan Laut Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi;
- b. *Mortality Rate* Ikan Hasil Pancing yang akan di Besarkan di Keramba Jaring Apung (KJA);
- c. Rancangan Paket Minawisata Berbasis Konservasi di Wakatobi;
- d. Partisipasi Perempuan di Desa Wisata Liya Togo, Wakatobi;
- e. Kajian Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Pelampung Budidaya Rumput Laut *Eucheuma cottonii* yang ramah Lingkungan di Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan audit lebih lanjut diketahui bahwa beberapa dosen anggota dari Tim Penelitian telah mutasi ke Satker lain di KKP, sehingga kegiatan pelaksanaan hingga pelaporan tidak dapat terkoordinir dengan baik, misalnya kegiatan pelaporan penelitian.

Sampai dengan saat audit, terdapat kajian penelitian yang belum diketahui outputnya atau masih dalam tahapan pelaporan dan belum tuntas diselesaikan hingga tahap publikasi, yaitu judul penelitian “Kajian Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Pelampung Budidaya Rumput Laut *Eucheuma cottonii* yang ramah Lingkungan di Kabupaten Wakatobi”.

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, Bagian Kesembilan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa “Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi unit, serta evaluasi dan pelaporan.”;

- b. SOP Pelaporan Penelitian yang menyatakan bahwa “*Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menginformasikan jadwal penyerahan laporan hasil kegiatan penelitian kepada Peneliti/Tim Peneliti*”.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) AKKP Wakatobi tidak cermat dalam mengoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya tahap pelaporan.

(0101)

Akibat

Pelaksanaan kegiatan penelitian terapan kelautan dan perikanan tidak dapat diketahui output/hasilnya, atau tidak dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* kelautan dan perikanan karena tidak terpublikasi, sehingga terjadi inefisiensi anggaran minimal senilai Rp20.000.000,00.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi agar:

- a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Unit P2M, atas ketidakcermatan dalam mengoordinir pelaporan hasil kegiatan penelitian yang diselenggarakan di tahun 2023; **(05)**
- b. Memerintahkan kepada Tim Kegiatan Penelitian untuk melanjutkan pelaporan kegiatan penelitian TA 2023 hingga dapat dipublikasikan kepada masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan dan tujuan organisasi dapat tercapai. **(06)**

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

- 3. Terdapat Kelebihan Bayar Pertanggungjawaban Uang Makan Pegawai dan Kekurangan Pemotongan Tunjangan Kinerja yang Belum Disetor ke Kas Negara senilai Rp922.585,00 (1.01.09)**

Kondisi

Diketahui alokasi pagu anggaran Tunjangan Kinerja pada TA 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp994.200.000,00 dan senilai Rp952.774.000,00, dan terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp988.946.179,00 (99,47% dari pagu anggaran) dan per Juni 2024 senilai Rp401.915.544,00 (42,18% dari pagu anggaran).

Adapun pagu anggaran uang makan PNS TA 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp106.370.000,00 dan Rp134.469.000,00, terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp98.781.000,00 (92,87% dari pagu anggaran) dan per Juni 2024 senilai Rp25.346.000,00 (18,85% dari pagu anggaran).

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Terdapat kelebihan dan kurang potong tunjangan kinerja PNS TA 2023 dan 2024 akibat dari kesalahan perhitungan formulasi salah satu komponen pada presensi elektronik dengan selisih total kurang potong senilai Rp90.585,00, sebagaimana rincian pada Lampiran 1;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan PNS TA 2023 dan 2024 akibat dari kesalahan perhitungan atas ketidaksesuaian jumlah kehadiran pegawai pada rekapitulasi kehadiran presensi elektronik dengan selisih lebih bayar senilai Rp832.000,00 sebagaimana rincian pada Lampiran 2,

yang belum disetor ke Kas Negara.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Negara, Bab II Pemberian Uang Makan, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "*Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan*", Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "*Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut: huruf a. tidak hadir kerja; b. sedang melaksanakan perjalanan dinas; c. sedang melaksanakan cuti,*" poin d s.d. e dst.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan

KKP, antara lain pada BAB IV Pengurangan Tunjangan Kinerja, Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pegawai dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja karena: poin a. Disiplin presensi,”* poin b. s.d. poin e. dst. Pasal 19 ayat (2) *“Pegawai yang terlambat masuk kerja tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pegawai yang bersangkutan mengganti waktu keterlambatan dengan pulang lebih lambat sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan”*

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Bendahara Pengeluaran dan Operator Penginput Aplikasi Gaji dan Tunjangan Kinerja kurang cermat saat melakukan penginputan jumlah hari kehadiran pegawai. **(0303)**
- b. Direktur AKKP Wakatobi lemah dalam mengendalikan pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara. **(0305)**

Akibat

Terdapat kelebihan bayar uang makan pegawai senilai Rp832.000,00 dan kekurangpotongan tunjangan kinerja senilai Rp90.585,00 yang belum disetor ke Kas Negara.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi agar:

- a. Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku; **(09)**
- b. Memerintahkan:
 - 1) Bendahara Pengeluaran dan Operator Penginput Aplikasi Gaji dan Tunjangan Kinerja supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penginputan jumlah hari kehadiran pegawai, **(09)**
 - 2) Bendahara Pengeluaran dan Pegawai terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar uang makan pegawai

senilai Rp832.000,00 dan kurang potong tunjangan kinerja senilai Rp90.585,00 untuk disetor ke Kas Negara. **(01)**

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

4. Pemotongan dan Penyetoran Pajak pada Pertanggungjawaban Belanja Tidak Sesuai Ketentuan (1.03.05)

Kondisi

Berdasarkan aplikasi Monsakti pada menu Monitoring SPP/SPM/SP2D dapat terakumulasi penyetoran pajak (PPN, PPh Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 4 ayat (2)) Satker AKKP Wakatobi tahun 2023 dan 2024.

Pada belanja barang dan modal tahun 2023, telah terealisasi penyetoran pajak total senilai Rp173.128.229,00, dan tahun 2024 (s.d. 20 Juni 2024) total senilai Rp48.490.843,00.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Terdapat kelebihan penyetoran pajak PPN dan PPh (Pasal 22 dan Pasal 23) pada transaksi belanja TA 2023 sebanyak 24 Surat Perintah Membayar (SPM) dengan selisih lebih setor senilai Rp2.872.531,00, dan TA 2024 sebanyak 2 (dua) SPM dengan selisih lebih setor senilai Rp299.549,00, sebagaimana rincian dalam Lampiran 3;
- b. Terdapat kekurangan penyetoran Pajak PPh Pasal 23 pada transaksi belanja TA 2023 sebanyak 2 (dua) SPM Nomor 00024A dan 00025A, tanggal 1 Maret 2023 masing-masing senilai Rp95.135,00 atau total senilai Rp190.270,00;
- c. Terdapat kesalahan akun penyetoran pajak PPh pasal 22, seharusnya menggunakan akun 421122, namun Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menggunakan akun 421124. Hal ini terdapat pada 2 (dua) SPM Nomor 00164A dan 00165A, tanggal 28 Agustus 2023.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, menyatakan bahwa “*Dengan*

menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, Bagan Akun Standar digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan, dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik”.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pada Pasal 227, Paragraf 2 Pengujian SPP dan Penerbitan SPM, Pasal 225 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK”. ayat (2) menyatakan bahwa “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik meliputi huruf f kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;”*

Sebab

Kondisi ini disebabkan:

- a. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) tidak cermat dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak, serta verifikasi SPM; **(0303)**
- b. Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA lemah dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. **(0305)**

Akibat

- a. Penyetoran pajak ke Kas Negara oleh Satker rentan dikomplain oleh Pihak Ketiga yang memiliki hak tagih atas suatu transaksi;
- b. Penyetoran pajak yang kurang ke Kas Negara mengakibatkan penerimaan pajak yang berkurang senilai Rp190.270,00.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi agar:

- a. Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku; **(09)**
- b. Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran dan PPSPM untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak dan verifikasi SPM **(05)**;
- c. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kekurangpotongan pajak penghasilan ke Kas Negara sesuai dengan SPM Nomor 00024A dan 00025A, tanggal 1 Maret 2023 masing-masing senilai Rp95.135,00 atau total senilai Rp190.270,00. **(01)**.

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp2.150.000,00 (1.01.09)

Kondisi

Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan bulan Oktober s.d. Desember 2023 dan Januari s.d. Februari 2024, diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang harian perjalanan dinas pada kegiatan Melaksanakan Pengantaran Dokumen Surat Perintah Membayar TA 2023 di KPPN Bau-Bau, tanggal 27 s.d. 30 November 2023 senilai Rp760.000,00 (Rp380.000,00 x 2 hari);
- b. Uang harian perjalanan dinas pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Mutu Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 s.d. 15 November 2023 di Courtyard by Marriot Bandung Dago, Jl. Ir.

- H. Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat, senilai Rp760.000,00 (UH Rp380.000,00 x 2 hari);
- c. Uang harian *fullboard* pada kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 22 - 28 Oktober, senilai Rp180.000,00;
 - d. Uang harian perjalanan dinas pada kegiatan FGD Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 sd 3 November 2023 di Onih Hotel Bogor, senilai Rp450.000,00 (Uang *Fullboard* Rp150.000,00 x 3 hari).

Hasil uji petik dokumen pertanggungjawaban keuangan sebagaimana rincian pada Lampiran 4.

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, pada:
 - 1) Pasal 1 ayat (24), menyatakan bahwa "*Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran*";
 - 2) Pasal 8, pada huruf f, menyatakan bahwa "*KPA memiliki tugas dan wewenang melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara*"; dan pada huruf h, yaitu menyatakan bahwa "*KPA mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran*";
 - 3) Pasal 12 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa "*PPK memiliki tugas dan wewenang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara*";
 - 4) Pasal 13, menyatakan bahwa "*PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara*";
 - 5) Pasal 15, menyatakan bahwa "*PPSPM memiliki tugas dan wewenang*:"

- a) *huruf a, menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;*
- b) *huruf b, menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan”;*
- 6) *Pasal 66 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah melakukan meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA.”*
- 7) *Pasal 65 ayat (1), menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”*
- b. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tahun 2022 tentang Standard Biaya Masukan TA 2023, pada:*
 - 8) *Lampiran I tentang SBM TA 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi:*
 - a) *Poin 30.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;*
 - b) *Poin 33.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di luar kota/di dalam kota.*
 - 9) *Penjelasan butir 33.2. menyatakan bahwa “Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.”*

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. *PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran tidak cermat dalam menguji kebenaran atas perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran (0304).*
- b. *Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA lemah dalam mengendalikan pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan. (0305)*

Akibat

Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pegawai senilai Rp2.150.000,00.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA agar:

- a. Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi (minimal sampling) untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku; **(09)**
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran atas perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran **(06)**;
- c. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas kepada pegawai senilai Rp2.150.000,00 dan selanjutnya disetor ke Kas Negara **(01)**.

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

6. Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Melebihi Standar Biaya Masukan TA 2023 senilai Rp3.140.594,59 (1.01.09)

Kondisi

Satker AKKP Wakatobi mengalokasikan anggaran seragam peserta didik bagi Pelaku Utama Perikanan TA 2023 senilai Rp143.500.000,00 dengan realisasi belanja senilai Rp143.500.000,00 (100%).

Pembelian seragam peserta didik senilai Rp143.500.000,00 dilaksanakan melalui e-katalog kepada CV Safari Jaya, sesuai Surat Pesanan Nomor B.2680/BRSDM-AKKP.WKTB/PL.430/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan audit diketahui bahwa item barang yang dipesan berupa Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) KP Taruna/i sebanyak 41 stel dengan harga satuan senilai Rp900.000,00/stel, namun sesuai Standar

Biaya Masukan TA 2023 disebutkan bahwa batas maksimal harga pengadaan pakaian seragam Mahasiswa/Taruna wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp600.000,00/stel.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, pada:

- a. Pasal 3 ayat (1), bahwa *“Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”*.
- b. Lampiran I Nomor 39 hal Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, mencantumkan *Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp600.000,00*.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. PPK dan Pejabat Pengadaan tidak cermat dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Taruna/i, yaitu tidak mempedomani ketentuan SBM TA 2023 **(0302)**.
- b. Direktorat AKKP Wakatobi selaku KPA lemah dalam mengendalikan pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan. **(0305)**

Akibat

Terdapat inefisiensi dan/atau pemborosan keuangan negara atas belanja pengadaan seragam peserta didik senilai Rp3.140.594,59 (Selisih harga 41 seragam senilai Rp12.300.000,00 – PPN 11% dari nilai kontrak awal senilai Rp3.656.756,76 – PPh Pasal 22 tarif 1,5% dari nilai kontrak awal senilai Rp498.648,65 – biaya pengiriman senilai Rp5.004.000,00).

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis kepada Direktorat Akademi Komunitas KP Wakatobi selaku KPA agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan atas ketidakcermatannya dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Taruna/I; **(08)**
- b. Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan negara tidak melampaui SBM yang ditetapkan Menteri Keuangan. **(09)**

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

7. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp2.954.995,00 (1.01.03)

Kondisi

Anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan TA 2023 di Satker AKKP Wakatobi total senilai Rp276.446.000,00 dengan realisasi senilai Rp274.139.000,00, yang seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Permanen senilai Rp59.999.000,00 dilaksanakan oleh CV Wakatobi Sejahtera, sesuai SPK Nomor B.2504/BRSDM-AKKP.WKTB/PL.430/XI/2023, tanggal 20 November 2023 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender sampai dengan 9 Desember 2023;
- b. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B, dan Rektorat senilai Rp198.500.000,00 dilaksanakan oleh CV Aisyah Dwi Putri, sesuai SPK Nomor B.2464/BRSDM-AKKP.WKTB/PL.430/XI/2023, tanggal 14 November 2023 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 25 hari kalender sampai dengan 8 Desember 2023.

Berdasarkan hasil audit diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Permanen (pengecatan pondasi dan tembok pagar) sesuai RAB seluas 595,81 m², sedangkan realisasi di lapangan seluas 540,81 m², sehingga terdapat selisih 54,86 m² dengan

harga per satuan m² senilai Rp30.818,04, atau terdapat kekurangan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh CV Wakatobi Sejahtera senilai **Rp1.690.678,00** (54,86 m² x Rp30.818,04).

- b. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Administrasi A, Administrasi B, dan Rektorat (acian dak plat lantai) sesuai RAB seluas 102,44 m², sedangkan realisasi di lapangan seluas 80,81 m², sehingga terdapat selisih 21,63 m² dengan harga per satuan m² senilai Rp58.452,00, atau terdapat kekurangan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh CV Aisyah Dwi Putri senilai **Rp1.264.317,00** (21,63m² x Rp58.452,00).

Kriteria

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 7 ayat (1), menetapkan bahwa *“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya yaitu: a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”*;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) huruf d, menetapkan bahwa *“PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya yaitu k. mengendalikan Kontrak”*; dan
 - 3) Pasal 57
 - a) ayat (2) menetapkan bahwa *“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”*; dan
 - b) ayat (3) menetapkan, *“PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”*.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yaitu pada Lampiran I,
 - 1) Poin 7.11 Pengendalian Kontrak, dinyatakan bahwa *“Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan*

Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, diantaranya yaitu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”; dan

- 2) Poin 8.1. Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan butir c dan d, menyatakan bahwa “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

Sebab

Kondisi ini disebabkan PPK kurang cermat dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan **(0501)**.

Akibat

Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan kepada CV Wakatobi Sejahtera senilai Rp1.690.678,00 dan CV Aisyah Dwi Putri senilai Rp1.264.317,00.

Rekomendasi

Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis kepada Direktur AKKP Wakatobi selaku KPA agar:

- a. Memberikan teguran secara tertulis PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; **(08)** dan
- b. Menginstruksikan secara tertulis PPK agar bertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan kepada CV Wakatobi Sejahtera senilai **Rp1.690.678,00** dan CV Aisyah Dwi Putri senilai **Rp1.264.317,00** untuk disetor ke Kas Negara. **(01)**

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi paling lambat Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

8. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Tertib (2.02.07)

Kondisi

Berdasarkan Laporan BMN Satker AKKP Wakatobi diketahui bahwa terdapat aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp21.563.309.980,00.

Berdasarkan audit diketahui bahwa:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 774/BRSDM.SUPM-BN/TU.420/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 dengan Pihak Kesatu yaitu Kepala SUPM Bone dan Pihak Kedua yaitu Direktur AKKP Wakatobi, diketahui bahwa Satker AKKP Wakatobi memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 12 NUP dengan nilai perolehan senilai Rp21.538.309.980,00.
- b. Terdapat BMN yang belum tertib, yaitu BMN hasil pengadaan perolehan sejak tahun 2012, meliputi:
 - 1) Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2 (dua) unit dengan masing-masing perolehan tahun 2012 dan 2013 seluas 61 m² dan 48 m² telah tercatat dalam laporan BMN, namun berdasarkan estimasi pengukuran luasan di lapangan belum sesuai dan penggolongan BMN tidak tepat jika tercatat sebagai pos jaga permanen, karena fungsinya menjadi rumah tinggal para pegawai;
 - 2) Bangunan Rumah samping Pos Jaga Permanen sebanyak 1 unit, Bangunan Pos Jaga samping Gerbang Kantor sebanyak 1 unit, serta Jalan Komplek dan Taman di depan Gedung Rektorat belum diketahui tahun perolehan, luasan dan belum tercatat dalam laporan BMN;
 - 3) Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana pada poin b.1) di atas dan Bangunan samping Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 1 (satu) unit belum dikategorikan menjadi Rumah Negara, belum dilakukan pendaftaran, penetapan status dan perubahan klasifikasi menjadi Rumah Negara sesuai peruntukannya.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, ketiga rumah tersebut saat ini dihuni oleh Pegawai, dan berfungsi sebagai rumah dinas

sebagaimana tertulis dalam kolom merk/tipe pada Lampiran BAST pada poin huruf a. diatas.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44 menyatakan bahwa *"Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya"*.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,
 - 1) Pasal 6 yaitu *"Pimpinan Instansi yang bersangkutan wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara yang ada dalam lingkup wewenangnnya kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui: b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depo, Tangerang dan Bekasi"*.
 - 2) Pasal 7
 - a) ayat (1) yaitu, *"Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III;*
 - b) ayat (2) *Penetapan status rumah negara berdasarkan penetapan status golongan dilakukan oleh: a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II"*.
 - 3) Pasal 8
 - a) ayat (1) yaitu, *"Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b) ayat (2) *Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah: a. Pimpinan instansi yang bersangkutan atau*

pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah jabatan dan b. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan II”.

- 4) Pasal 9 yaitu *“Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut: a. Menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan di lingkungan instansi tersebut.*
- 5) Pasal 10 yaitu *“Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut: a. Berstatus pegawai negeri; b. Mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk; dan c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.*
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Pasal 5 ayat (4) yaitu, *“Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki tanggung jawab: melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya; dan melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa Rumah Negara”.*
- d. Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, menetapkan *“Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri”.*
- e. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN, pada Bab III:
 - 1) Poin A. Prinsip Umum
Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari: d) hasil audit/pengawasan pelaksanaan pengelolaan BMN oleh APIP K/L atau BPKP.
 - 2) Poin E. Penertiban atas Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Pada angka 1, Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Penatausahaan BMN apabila ditemukan kondisi antara lain: m. penghapusan atas BMN yang dihentikan dari operasional belum

dilaksanakan, p. BMN yang dicatat dalam Daftar dan/atau Laporan Barang Rusak Berat belum diusulkan Pemindahtanganan/ Penghapusan kepada Pengguna Barang/Pengelola Barang.

Sebab

Direktur AKKP Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) kurang cermat dalam pengendalian pengelolaan dan penatausahaan BMN yang berada dalam penguasaannya. **(0304)**

Akibat

- a. Laporan BMN Satker AKKP Wakatobi TA 2023 tidak menggambarkan nilai gedung dan bangunan secara wajar.
- b. Administrasi pencatatan BMN kurang tertib, berpotensi tidak mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan, dan rusak;
- c. Negara belum memperoleh PNBPNP atas pemanfaatan aset gedung bangunan sebagai rumah negara sesuai ketentuan.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP supaya menginstruksikan secara tertulis Direktur AKKP Wakatobi selaku KPB agar:

- a. Memerintahkan kepada Petugas BMN untuk: **(09)**
 - 1) Melakukan inventarisasi kembali BMN dengan melengkapinya dengan Berita Acara Inventarisasi BMN secara internal, dan Surat Tugas Inventarisasi;
 - 2) Berkoordinasi dengan KPKNL guna mengajukan permohonan penilaian terhadap BMN yang telah diinventarisasi;
 - 3) Melakukan pencatatan BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang sesuai.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk: **(11)**
 - 1) Melakukan penilaian dan klasifikasi 3 (tiga) unit gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara; dan
 - 2) Mengkonsultasikan besaran biaya sewa rumah negara tersebut.
- c. Mengajukan kepada Sekretaris BPPSDMKP setelah terbit hasil penilaian dan klasifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk: **(11)**

- 1) Penetapan status 3 (tiga) unit Gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara;
- 2) Permohonan izin penghunian Rumah Negara kepada Kepala BPPSDMKP.

Tanggapan

Temuan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Minggu ke-4 bulan Juli 2024.

C. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Sebelumnya

Belum pernah dilaksanakan Audit Kinerja pada AKKP Wakatobi tahun-tahun sebelumnya.

a.n. Inspektur Jenderal
Pengendali Mutu pada Inspektorat III,



Noor Adram Bachtiar

Lampiran 1. Surat Dinas

Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Lampiran Rekapitulasi Selisih Tunjangan Kinerja Lebih dan Kurang Potong TA 2023 dan 2024 pada AK KP Wakatobi				
No	Nama PNS	TA 2023	TA 2024	Jumlah Selisih
1	Khairudin Isman	(806)	-	(806)
2	Dewi Utami	(3,353)	-	(3,353)
3	La Ode Muh Norsa	280	-	280
4	Sariamin Sahari	285	862	1,147
5	Alfi Kusuma Admaja	31,722	(207)	31,515
6	La Ode Mansyur	36,764	-	36,764
7	Kezia Gloria Runtu	(1,841)	55	(1,786)
8	Normayasari	-	(8,918)	(8,918)
9	Ahmad Yasin	35,742	-	35,742
10	Moh. Fattah Alfian	-	-	-
	Total	98,793	(8,208)	90,585
Ket:	Minus	Lebih Potong		
	Plus	Kurang Potong		
	TA 2023	Januari s.d. Desember		
	TA 2024	Januari s.d. Mei		

Lampiran 2. Surat Dinas

Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Lampiran Lebih Kurang Bayar Uang Makan PNS AK KP Wakatobi TA 2023 s.d. Mei 2024:

Bulan	Jumlah Hari Lebih/Kurang Bayar	Jumlah (Rp)
April 2023	Ahmad Yasin Lebih 2 HARI	74.000
	Kezia lebih 2 hari	74.000
Juni 2023	Kezia Gloria lebih 2 hari	74.000
Agustus 2023	Mohammad Fattah Alfian lebih 1 hari	35.000
	La Ode Muhammad Norsa lebih 7 hari	185.000
September 2023	La Ode Mansyur lebih 3 hari	123.000
	Sariamin Sahari lebih 1 hari	41.000
	Kezia Gloria lebih 1 hari	37.000
Desember 2023	Kezia Gloria lebih 1 hari	37.000
Januari 2024	Khairudin Isman lebih 5 hari	185.000
	Normayasari lebih 2 hari	74.000
	Sariamin Sahari lebih 1 hari	41.000
Mei 2024	Kezia Gloria kurang 4 hari	- 148.000
	Total	832.000



Lampiran 3. Surat Dinas

Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Kelebihan dan Kekurangan Setor Pajak PPN PPh AKKP Wakatobi Tahun 2023 dan 2024

	Nomor dan Tanggal		Nilai SPM		Nilai Seharusnya		Selisih		Jumlah
No.	TA 2023		PPh	PPN	PPh	PPN	PPh	PPN	PPN + PPh
	Kelebihan setor Pajak								
1	'00035A	24-MAR-23	92,905	681,306	84,459	619,369	8,446	61,937	70,382
2	'00036A	24-MAR-23	92,905	681,306	84,459	619,369	8,446	61,937	70,382
3	'00038A	28-MAR-23	297,297	2,180,180	270,270	1,981,982	27,027	198,198	225,225
4	'00039A	28-MAR-23	297,297	2,180,180	270,270	1,981,982	27,027	198,198	225,225
5	'00040A	28-MAR-23	297,297	2,180,180	270,270	1,981,982	27,027	198,198	225,225
6	'00041A	28-MAR-23	297,297	2,180,180	270,270	1,981,982	27,027	198,198	225,225
7	'00042A	28-MAR-23	297,297	2,180,180	270,270	1,981,982	27,027	198,198	225,225
8	'00043A	29-MAR-23	35,676	261,622	32,432	237,838	3,244	23,784	27,028
9	'00044A	29-MAR-23	267,568	1,962,162	243,243	1,783,784	24,325	178,378	202,703
10	'00074A	17-MAY-23	112,973	828,468	102,703	753,153	10,270	75,315	85,585
11	'00164A	28-AUG-23	150,135	1,100,991	136,486	1,000,901	13,649	100,090	113,739
12	'00165A	28-AUG-23	222,973	1,635,135	202,703	1,486,486	20,270	148,649	168,919
13	'00174A	19-SEP-23	92,905	681,306	84,459	619,369	8,446	61,937	70,382
14	'00175A	19-SEP-23	92,905	681,306	84,459	619,369	8,446	61,937	70,382
15	'00203A	19-OCT-23	148,649	1,090,090	135,135	990,991	13,514	99,099	112,613
16	'00208A	30-OCT-23	44,595	327,027	40,541	297,297	4,054	29,730	33,784
17	'00213A	'09-NOV-23	197,703	1,449,820	179,730	1,318,018	17,973	131,802	149,775
18	'00214A	13-NOV-23	202,162	1,482,523	183,784	1,347,748	18,378	134,775	153,153
19	'00215A	13-NOV-23	222,973	1,635,135	202,703	1,486,486	20,270	148,649	168,919
20	'00239A	22-NOV-23	127,838	937,477	116,216	852,252	11,622	85,225	96,847
21	'00276A	14-DEC-23	151,622	1,111,892	137,838	1,010,811	13,784	101,081	114,865
22	'00277A	15-DEC-23	48,772	357,659	44,338	325,144	4,434	32,515	36,949
									2,872,531
	Kekurangan setor pajak								
1	'00024A	'01-MAR-23	864,865	-	960,000	-	(95,135)	-	(95,135)
2	'00025A	'01-MAR-23	864,865	-	960,000	-	(95,135)	-	(95,135)
									(190,270)
	TA 2024								
	Kelebihan setor Pajak								
	'00179A	'03-JUN-24	112,973	828,468	77,027	564,865	35,946	263,603	299,549

Lampiran 4. Surat Dinas

Nomor : T.226/ITJ/HP.110/VII/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Rekapitulasi Hasil Uji Petik Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

No	Bulan	Uraian Belanja	Pegawai	No. SPM	Tgl. SPM	Permasalahan	Keuangan (Rp)
1	Desember 2023	Perjalanan Dinas Melaksanakan Pengantaran Dokumen Surat Perintah Membayar TA 2023 di KPPN Bau-Bau	La Ode Muhammad Norsa	00274A	14/12/2023	ST dan Laporan Perdin tanggal 27 sd 30 November, UH dibayarkan sejak tanggal 25 sd 30 November.	Rp 760.000,00
2	Desember 2023	Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Mutu Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan pada 9 sd 15 November 2023 di Courtyard by Marriot Bandung Dago, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat	Indah Alsita	00253A	04/12/2023	- Kegiatan Fullboard pada tanggal 10 sd 11 (berdasarkan Undangan); - Tanggal 12 sd 13 dibayarkan UH Jawa Barat. pelaksana perdin dalam perjalanan ke pusat pendidikan dalam rangka koordinasi terkait mutasi pegawai ybs.	Rp 760.000,00
3	Nov-23	Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 22 - 28 Oktober	La Ode Mansyur	00235A	21/11/2023	Selisih perhitungan kelebihan uang fullboard senilai Rp180.000,00 (Rp720.000 - 540.000)	Rp 180.000,00

No	Bulan	Uraian Belanja	Pegawai	No. SPM	Tgl. SPM	Permasalahan	Keuangan (Rp)
4	Nov-23	Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan FGD Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 sd 3 November 2023 di Onih Hotel Bogor	Khairudin Isman	00232A	21/11/2023	Keterangan dalam undangan bahwa uang saku peserta fullboard (1-3 Nov) diberikan dari panitia/penyelenggara, namun dibayarkan lagi oleh satker	450.000
						Total	2.150.000

a.n. Inspektur Jenderal
Pengendali Mutu pada Inspektorat III,



Noor Adram Bachtiar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1699/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Terdapat Kelebihan Bayar Pertanggungjawaban Uang Makan Pegawai dan Kekurangan Pemotongan Tunjangan Kinerja yang Belum Disetor ke Kas Negara senilai Rp922.585,00, kepada Saudara diinstruksikan agar:

- a. Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Memerintahkan:
 - 1) Bendahara Pengeluaran dan Operator Penginput Aplikasi Gaji dan Tunjangan Kinerja supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penginputan jumlah hari kehadiran pegawai;
 - 2) Bendahara Pengeluaran dan Pegawai terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar uang makan pegawai senilai Rp832.000,00 dan kurang potong tunjangan kinerja senilai Rp90.585,00 untuk disetor ke Kas Negara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

Nomor : B.1700/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Pemotongan dan Penyetoran Pajak pada Pertanggungjawaban Belanja Tidak Sesuai Ketentuan, kepada Saudara diinstruksikan agar :

- Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran dan PPSPM untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak dan verifikasi SPM;
- Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kekurangpotongan pajak penghasilan ke Kas Negara sesuai dengan SPM Nomor 00024A dan 00025A, tanggal 1 Maret 2023 masing-masing senilai Rp95.135,00 atau total senilai Rp190.270,00.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1701/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp2.150.000,00, kepada Saudara diinstruksikan agar:

- Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara dengan melakukan verifikasi (minimal sampling) untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- Memerintahkan secara tertulis kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran atas perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas kepada pegawai senilai Rp2.150.000,00 dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1702/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Melebihi Standar Biaya Masukan TA 2023 senilai Rp3.140.594,59, kepada Saudara selaku KPA diinstruksikan agar:

- Memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan atas ketidakcermatannya dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Taruna/I;
- Melakukan pengendalian atas pengelolaan dan/atau pertanggungjawaban keuangan negara untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan negara tidak melampaui SBM yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1703/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp2.954.995,00, kepada Saudara selaku KPA diinstruksikan agar:

- Memberikan teguran secara tertulis PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
- Menginstruksikan secara tertulis PPK agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan kepada CV Wakatobi Sejahtera senilai **Rp1.690.678,00** dan CV Aisyah Dwi Putri senilai **Rp1.264.317,00** untuk disetor ke Kas Negara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1704/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Tertib, kepada Saudara selaku KPB diinstruksikan agar:

- a. Memerintahkan kepada Petugas BMN untuk:
 - 1) Melakukan inventarisasi kembali BMN dengan melengkapinya dengan Berita Acara Inventarisasi BMN secara internal, dan Surat Tugas Inventarisasi;
 - 2) Berkoordinasi dengan KPKNL guna mengajukan permohonan penilaian terhadap BMN yang telah diinventarisasi;
 - 3) Melakukan pencatatan BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang sesuai.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk:
 - 1) Melakukan penilaian dan klasifikasi 3 (tiga) unit gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara; dan
 - 2) Mengkonsultasikan besaran biaya sewa rumah negara tersebut.
- c. Mengajukan kepada Sekretaris BPPSDMKP setelah terbit hasil penilaian dan klasifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi untuk:
 - 1) Penetapan status 3 (tiga) unit Gedung pos jaga permanen menjadi Rumah Negara;
 - 2) Permohonan izin penghunian Rumah Negara kepada Kepala BPPSDMKP.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1697/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Tidak Sesuai dengan Ketentuan, kepada Saudara diinstruksikan agar:

- a. Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan penyampaian data dukung capaian kinerja;
 - 2) Lebih cermat dalam menganalisis potensi risiko dalam usulan target kinerja;
 - 3) Mengunggah data dukung capaian kinerja secara berkala pada aplikasi Kinerjaku.
- b. Mengusulkan revisi Manual IKU ke Pusat Pendidikan KP

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

Nomor : B.1698/BPPSDM/HP.130/VII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 pada
Akademi Komunitas KP Wakatobi

22 Juli 2024

Yth. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
di Wakatobi

Menindaklanjuti rekomendasi surat Inspektorat Jenderal, Nomor: T.226/ITJ/HP.110/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, terhadap temuan hasil audit Kajian Penelitian Terapan Belum Dapat Diketahui Outputnya, dan Terjadi Inefisiensi, kepada Saudara diinstruksikan agar:

- Menegur secara tertulis kepada Kepala Unit P2M, atas ketidakcermatan dalam mengoordinir pelaporan hasil kegiatan penelitian yang diselenggarakan di tahun 2023;
- Memerintahkan kepada Tim Kegiatan Penelitian untuk melanjutkan pelaporan kegiatan penelitian TA 2023 hingga dapat dipublikasikan kepada Masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala BPPSDM,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

I Nyoman Radiarta

Tembusan :
Inspektur Jenderal KKP